



LAPORAN KINERJA



**Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Kata Pengantar

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

Kepala Pusat Teknologi Informasi

Sekretariat Jenderal DPR RI

Alhamdulillah, Segala puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Tahun 2023 telah menjadi suatu perjalanan yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi kami di Pusat Teknologi Informasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kami berfokus untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, sejalan dengan komitmen kami untuk memberikan dukungan teknologi informasi yang optimal bagi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Semoga Laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi pencapaian, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Kami menyadari bahwa evaluasi dan umpan balik konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Setjen DPR RI sangat berharga bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak di Pusat Teknologi Informasi dan semua yang telah menunjukkan komitmen, dedikasi, waktu, dan tenaga dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Kerja sama yang solid inilah yang telah membantu kita mencapai berbagai pencapaian.

Jakarta, 19 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
EXECUTIVE SUMMARY	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Gambaran Umum	11
1.2. Dasar Hukum.....	11
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	12
1.3.1. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi.....	14
1.3.2. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi.....	14
1.3.3. Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	15
1.3.4. Komposisi Pegawai Pusat Teknologi Informasi.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Sasaran Program Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik	27
3.1.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	27
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	27
3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra.....	29
3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	30
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	31
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	33
3.2. Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Presentase Dukungan Teknologi Informasi).....	37
3.2.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	37
3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	37
3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra.....	40

3.2.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	40
3.2.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	41
3.2.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	43
3.2.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	46
3.3.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Presentase Aplikasi yang Terintegrasi)	49
3.3.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	49
3.3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	49
3.3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra.....	51
3.3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	51
3.3.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	51
3.3.6.	Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	52
3.3.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	53
3.4.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Indeks Kepuasan Anggota DPR RI).....	54
3.4.1.	Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja	54
3.4.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	55
3.4.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra.....	55
3.4.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	56
3.4.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	56
3.4.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	57
3.4.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	57
3.5.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Presentase Realisasi Anggaran)	58
3.5.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	58
3.5.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	63

3.5.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra.....	64
3.5.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	64
3.5.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	65
3.5.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	65
3.5.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	66
BAB IV	PENUTUP.....	71
4.1.	Kesimpulan.....	71
4.2.	Rekomendasi.....	72
LAMPIRAN 1	74
LAMPIRAN 2	76
LAMPIRAN 3	78
LAMPIRAN 4	79
LAMPIRAN 5	80
LAMPIRAN 6	81
LAMPIRAN 7	82
LAMPIRAN 8	83
LAMPIRAN 9	85
LAMPIRAN 10	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Pusat Teknologi Informasi	16
Tabel 2 Target Sasaran Program 3 pada Perubahan Renstra Setjen DPR 2021-2024	20
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2021-2023.....	21
Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja dan Kategori	23
Tabel 5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	23
Tabel 6 Kegiatan Utama dan Indikator dari Sasaran Program Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	24
Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan Renstra Setjen DPR RI 2021-2024	25
Tabel 8 Perbandingan Target Akhir 2024 dengan Capaian 2023	26
Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	27
Tabel 10 Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Tahun ke Tahun	27
Tabel 11 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	29
Tabel 12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional SPBE.....	30
Tabel 13 Hasil Penilaian SPBE Tahun 2023 Kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara	31
Tabel 14 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	31
Tabel 15 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	37
Tabel 17 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Tahun ke Tahun	38
Tabel 18 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	40
Tabel 19 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	41
Tabel 20 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	42
Tabel 21 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	43
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	49
Tabel 23 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Aplikasi yang Terintegrasi dari Tahun ke Tahun.....	49

Tabel 24 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	51
Tabel 25 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	51
Tabel 26 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	52
Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	54
Tabel 28 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi dari Tahun ke Tahun	55
Tabel 29 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	55
Tabel 30 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	56
Tabel 31 Hasil Survey IKM Layanan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023.....	58
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	58
Tabel 33 Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi per Triwulan dan Kumulatif Tahun 2023.....	59
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	63
Tabel 35 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi dari Tahun ke Tahun	63
Tabel 36 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	64
Tabel 37 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	65
Tabel 38 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pustekinfo Setjen DPR RI	12
Gambar 2 Histori Penilaian SPBE DPR RI	28
Gambar 3 Foto Kegiatan Ngopi Edisi "Forum Satu Data DPR RI" dan Peresmian Portal Satu Data DPR RI	35
Gambar 5 Grafik Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi per Triwulan Tahun 2023 (Sebelum Blokir)	60
Gambar 6 Grafik Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi per Triwulan Tahun 2023 (Setelah Blokir)	60

EXECUTIVE SUMMARY

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Teknologi Informasi merupakan salah satu unsur pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi.

Terdapat 2 sasaran program dan 5 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Pusat Teknologi Informasi di tahun 2023, yakni:

1. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik
 - 1.1 Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi
 - 2.1 Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - 2.2 Persentase aplikasi yang terintegrasi
 - 2.3 Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Teknologi dan Informasi
 - 2.4 Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi dan Informasi

Pada sasaran program yang terkait dengan penerapan indikator kinerja Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicapai melalui hasil indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 yakni sebesar 3,57 (predikat Sangat Baik).

Pada sasaran program untuk meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi dengan indikator dukungan teknologi informasi yang telah disiapkan oleh Pusat Teknologi Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni dalam bentuk ketersediaan aplikasi dan sistem informasi

yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dengan didukung juga dengan pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI di seluruh wilayah DPR RI, pengembangan infrastruktur jaringan internet, dan pengembangan teknologi keamanan informasi. Sedangkan untuk jumlah aplikasi yang terintegrasi selama tahun 2023 telah mencapai 96% yang terdiri dari 88 aplikasi yang digunakan baik oleh Anggota DPR RI maupun Pegawai Sekretariat Jenderal.

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi diperoleh melalui survei kepuasan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 dengan kategori teknologi informasi yang memberikan hasil IKM 91,229 (Sangat Baik) dengan Nilai Indeks sebesar 3,69 dari target 3,10.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Teknologi Informasi yang telah dilakukan oleh dua Bidang unit kerja yakni Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi memberikan kenaikan capaian realisasi penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2023 dengan capaian sebesar 99,59% dan realisasi anggaran keseluruhan Rp 57.434.426.470,-.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, Pusat Teknologi Informasi pun tak luput dari kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun non teknis. Kendala teknis terkait jaringan dalam pelaksanaan dukungan teknologi informasi selama tahun 2023 seperti terjadinya gangguan koneksi jaringan internet yang berasal dari ISP (*Internet Service Provider*) yang terjadi satu kali dalam tahun 2023.

Sedangkan kendala non teknis yang dialami oleh Pusat Teknologi Informasi diantaranya terkait administrasi yaitu alur proses dan mekanisme dalam pengajuan clearance anggaran yang memerlukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika cukup menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai perencanaan program kerja yang telah disusun sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung parlemen modern yang ditandai dengan transformasi digital pada pelayanan administrasi, teknis, persidangan dan keahlian, Pusat Teknologi Informasi secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

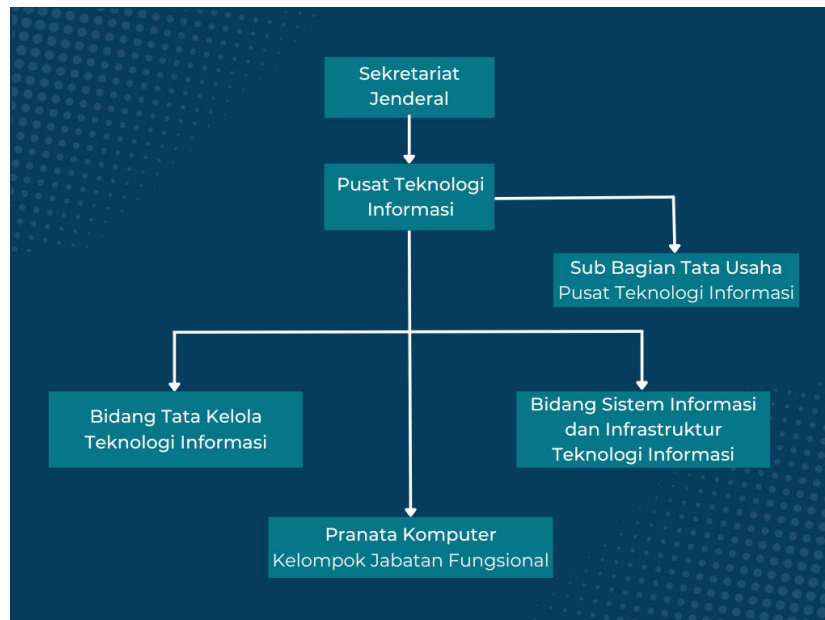
Meningkatnya kebutuhan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai instrumen dalam pekerjaan sehari-hari, Pusat Teknologi Informasi memiliki 2 unit kerja pada lingkup eselon III yang secara operasional mendukung pemberian layanan teknologi informasi kepada pengguna layanan.

1.2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- b. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- g. SK Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1787/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Pustekinfo Setjen DPR RI

(Sumber: Setjen DPR RI, 2021)

Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun tugas Pusat Teknologi Informasi adalah melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi, Pusat Teknologi Informasi memiliki fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata Kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- c. pelaksanaan tata kelola teknologi informasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- e. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang teknologi informasi;
- f. pelaksanaan tata usaha Pusat Teknologi Informasi;
- g. penyusunan laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Dengan dibantu oleh 2 unit bidang Eselon III di Pusat Teknologi Informasi dan 1 subbagian tata usaha Pusat Teknologi Informasi Eselon IV, pelaksanaan kegiatan dan operasional layanan teknologi informasi dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi bidang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06/PER-SEKJEN/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pasal 336 dan Pasal 337.

1.3.1. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana induk teknologi informasi, kebijakan teknis dan standardisasi di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional penggunaan layanan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi;
2. penyusunan bahan kegiatan di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional pengguna layanan teknologi informasi;
3. pelaksanaan dan evaluasi tata kelola teknologi informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional pengguna layanan teknologi informasi;
4. pelaksanaan bimbingan dan supervisi terkait pembangunan dan pengembangan layanan teknologi informasi; dan
5. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi.

1.3.2. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Bertugas melaksanakan pengelolaan di bidang pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur teknologi informasi, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
2. penyusunan bahan kegiatan di bidang pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus;
3. pelaksanaan, pengujian dan evaluasi pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus;
4. pelaksanaan pemeliharaan, identifikasi, analisis, pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur teknologi informasi, layanan pusat data, dan jaringan komputer;
5. pengelolaan aset teknologi informasi; dan
6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi.

1.3.3. Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi

Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Teknologi Informasi, bidang, dan kelompok jabatan fungsional.

1.3.4. Komposisi Pegawai Pusat Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan kegiatan dukungan layanan teknologi informasi, Pusat Teknologi Informasi memiliki kapasitas sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, penyusun bahan kebijakan, pengelola data, dan pegawai non ASN.

Apabila peran pejabat struktural sebagai posisi sentral yang menghubungkan antara lini depan dan lini atas, maka peran dari pejabat fungsional pranata komputer adalah sebagai pelaksana teknis operasional layanan teknologi informasi. Kedua peran ini dibantu oleh dukungan secara administratif oleh sub

bagian tata usaha dan dukungan pelaksanaan kegiatan teknis oleh pegawai non ASN. Adapun secara rinci, komposisi pegawai Pusat Teknologi Informasi dan kebutuhan sesuai analisis beban kerja tersaji pada Tabel 1:

Tabel 1 Jumlah Pegawai Pusat Teknologi Informasi

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Pusat Teknologi dan Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Utama	0	1
Pranata Komputer Ahli Madya	2	6
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1
	3	9

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Muda	4	7
Pranata Komputer Ahli Pertama	2	7
Pranata Komputer Penyelia	0	2
Pranata Komputer Mahir	0	3
Pranata Komputer Terampil	3	2
Pengadministrasi Perkantoran	0	2
	10	24

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Muda	3	5
Pranata Komputer Ahli Pertama	3	10
Pranata Komputer Penyelia	0	1
Pranata Komputer Mahir	0	5
Pranata Komputer Terampil	4	9
Pengadministrasi Perkantoran	0	2
	11	33

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1	2
Pengolah Data dan Informasi	0	3
Pengadministrasi Perkantoran	0	2
Arsiparis Terampil	0	1
	2	9

REKAPITULASI TOTAL	SDM	KEBUTUHAN ABK
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas	4	4
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	22	71
	26	75

NAMA JABATAN	SDM
TSP	17
Fungsional Bebas Tugas karena Tugas Belajar	1
	18

Jumlah keseluruhan pegawai di Pusat Teknologi Informasi adalah 26 orang yang terdiri dari 1 Kepala Pusat, 2 Kepala Bidang, 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 Pelaksana, dan 21 Pranata Komputer yang terdiri dari berbagai jenjang Pranata Komputer Terampil hingga Madya dengan konsentrasi lingkup kompetensi yang meliputi Tata Kelola Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Informasi, Infrastruktur, Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi.

Sesuai data analisis beban kerja (ABK) Pusat Teknologi Informasi tahun 2023 pada Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, kebutuhan terhadap pegawai Pranata Komputer Ahli Muda sebanyak 7 orang, Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 7 orang, Pranata Komputer Penyelia sebanyak 2 orang, Pranata Komputer Mahir 3 orang, Pranata Komputer Terampil 2 orang dan Pengadministrasi Perkantoran 2 orang. Kekurangan SDM di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi masih terdapat 14 orang.

Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi kebutuhan Pranata Komputer Ahli Muda sebanyak 5 orang, Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 10 orang, Pranata Komputer Penyelia sebanyak 1 orang, Pranata Komputer Mahir 5 orang, Pranata Komputer Terampil 9 orang, dan Pengadministrasi Perkantoran 2 orang. Kekurangan SDM di Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi masih terdapat 22 orang. Oleh karena itu pada tahun 2023 diberdayakan TSP (Tenaga Sistem Pendukung) sebanyak 17 orang untuk membantu dalam hal operasional teknis dan administratif penanganan gangguan layanan teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020-2024 yang telah dilakukan perubahan revisi ke-2 per Oktober 2023, disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mengacu kepada visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik, dengan indikator kinerja program Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ini diturunkan sebagai sasaran program dan indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi yang dijabarkan dalam target mencapai indeks "Sangat Baik" pada tahun 2023. Sehingga Pusat Teknologi Informasi harus mampu meningkatkan indeks SPBE

ini karena pada tahun sebelumnya di 2022 telah mengalami peningkatan dengan berhasil meraih indeks sebesar 2,95 dengan predikat “Baik”.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pusat Teknologi Informasi memiliki target pada sasaran program Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 2 Target Sasaran Program 3 pada Perubahan Renstra Setjen DPR 2021-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Renstra			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

(Sumber: Renstra Setjen DPR 2020-2024 Revisi Ke-2)

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pusat Teknologi Informasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi tahun 2023 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2021-2023

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI				
Sasaran Program	Indikator	Target PK		
		2021	2022	2023
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85%	85%	90%
	b. Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%	90%	95%
	c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,10	3,10	3,31
	d. Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	92,5%	93%	95%

Satker/Program/Kegiatan	Anggaran pada PK		
	2021	2022	2023
Program Dukungan Manajemen	Rp. 152.794.334.000	Rp. 57.365.474.000	Rp. 57.672.789.000

Penetapan target pada indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selaras dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Setjen DPR tahun 2021-2024 Revisi Ke-2. Sedangkan target indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan sebesar 90% pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, indikator Persentase aplikasi yang terintegrasi ditargetkan sebesar 95%, indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi memiliki target 3,31, dan indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi ditargetkan sebesar 95%.

Penetapan target indikator kinerja pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi untuk indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023, dijabarkan menjadi kegiatan pada rencana aksi melalui ketersediaan aplikasi dan sistem informasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dengan didukung juga kegiatan pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI di seluruh wilayah DPR RI, pengembangan infrastruktur jaringan internet, dan pengembangan teknologi keamanan informasi.

Sedangkan penetapan target indikator kinerja untuk jumlah aplikasi yang terintegrasi selama tahun 2023 telah mencapai 96% yang terdiri dari 88 aplikasi yang ada di DPR RI.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi diturunkan dan dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja Bidang yang diukur dengan menggunakan satuan-satuan target yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Tingkat pencapaian target kinerja ini selanjutnya akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

Untuk memudahkan dalam pengukuran, tingkat capaian sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja secara kuantitas dan kualitas/mutu. Secara kuantitas, setiap target indikator kinerja diukur dengan menggunakan satuan dokumen. Semua *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh unit kerja memiliki dokumen hasil kerja dalam bentuk fisik, laporan atau catatan atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja merupakan acuan ukuran kinerja dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja di lingkungan Pusat Teknologi Informasi.

Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja dan Kategori

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Tabel berikut memperlihatkan target kinerja, realisasi dan capaian Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target PK	Realisasi 2023	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%	87%	97%	Sangat Tinggi

PERJANJIAN KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target PK	Realisasi 2023	Capaian	Kategori
	b. Persentase aplikasi yang terintegrasi	95%	96%	101%	Sangat Tinggi
	c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,31	3,649	110%	Sangat Tinggi
	d. Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	95%	99,59%	104%	Sangat Tinggi

(Sumber: Pusat Teknologi Informasi 2023)

Penyesuaian arah kebijakan dan strategi yang telah disesuaikan dengan Revisi Road Map RB Setjen DPR RI. Pusat Teknologi Informasi berperan dalam mencapai target untuk Sasaran Program Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Arah Kebijakan yang dipetakan ke dalam kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6 Kegiatan Utama dan Indikator dari Sasaran Program Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

RENSTRA SETJEN DPR RI TAHUN 2021-2024 (PERUBAHAN)			
Sasaran Program	Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	a. Indeks SPBE b. Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE

Kegiatan yang merupakan implementasi dari penyesuaian terhadap Revisi Road Map RB Setjen DPR RI ini dijabarkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023 yakni pada kegiatan utama Pelaksanaan data statistik sektoral dengan Indikator Kegiatan Utama Tingkat Kematangan

Penyelenggaraan Statistik Sektorial melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial di lingkungan Setjen DPR RI pada aplikasi EPSS Badan Pusat Statistik.

Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional dengan Indikator Kegiatan Utama Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE dilakukan dengan penggunaan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE dari KemenPAN-RB untuk ketersediaan Arsitektur SPBE DPR RI yang terdiri dari Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

Penetapan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi sudah selaras dengan target pada Renstra tahun 2023. Jika disandingkan antara target Renstra untuk tahun 2023 dengan realisasi di tahun 2023 ini, hasil capaiannya memenuhi target yang diharapkan dan masih dalam kategori sangat tinggi seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan Renstra Setjen DPR RI 2021-2024

RENSTRA SETJEN DPR RI TAHUN 2021-2024 (PERUBAHAN) PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi 2023	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%	87%	97%	Sangat Tinggi
	b. Persentase aplikasi yang terintegrasi	95%	96%	101%	Sangat Tinggi
	c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,31	3,649	110%	Sangat Tinggi

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja dalam 2 (dua) sasaran program yang ditargetkan oleh Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2023, yakni “Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik” dan “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi”.

Kinerja yang diharapkan merupakan *outcome* yang berkesinambungan hasil dari rangkaian perencanaan kegiatan, pedoman, dan pelaksanaan, serta evaluasi. Indikator yang terukur akan menghasilkan benang merah dari setiap tahapan tersebut, dan dapat memberikan rekomendasi demi perbaikan di masa yang akan datang secara berkesinambungan.

Tabel 8 Perbandingan Target Akhir 2024 dengan Capaian 2023

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Akhir Tahun 2024	Realisasi 2023	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,6)	Sangat Baik (3,57)	99%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	1. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	91%	87%	96%	Sangat Tinggi
	2. Persentase aplikasi yang terintegrasi	96%	96%	100%	Sangat Tinggi
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,32	3,649	109%	Sangat Tinggi

3.1. Sasaran Program Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada sasaran program terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik terdapat 1 (satu) indikator kinerja yakni “**Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**” yang dilaksanakan melalui evaluasi SPBE DPR RI.

3.1.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian SPBE tahun 2023, Setjen DPR RI mendapatkan indeks nilai 3,57 (Sangat Baik). Sehingga jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2021-2024 dan Perjanjian Kinerja, maka hasil capaiannya sebesar 102% (Sangat Tinggi).

Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja : Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
Target Renstra Tahun 2023	Target PK Tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kategori
Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%	Sangat Tinggi

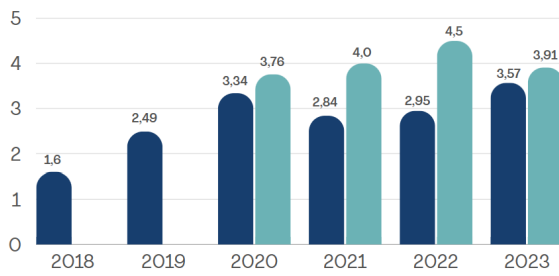
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 10 Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Tahun ke Tahun

Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Baik	Baik (2,84)	100%	Baik	Baik (2,95)	100%	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian indeks pelaksanaan SPBE selama 3 tahun terakhir diketahui bahwa pada hasil SPBE tahun 2023 capaian realisasi sudah melebihi target yang diharapkan di tahun 2023. Perolehan angka indeksnya pada indikator SPBE di tahun 2022 mengalami kenaikan dari 2,95 menjadi 3,57 pada tahun 2023 dengan predikat “Sangat Baik”.

Histori Nilai SPBE DPR RI



Tahun 2022
Jumlah K/L/I yang ikut SPBE **451** dengan rata-rata nasional **2,89**

Tahun 2023
Jumlah K/L/I yang ikut SPBE **621** dengan rata-rata nasional **2,81**

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Gambar 2 Histori Penilaian SPBE DPR RI

Pada bulan Juni 2023 pengumpulan *evidence* untuk penilaian SPBE tahun 2023 mulai dilakukan. Proses pengumpulan *evidence* SPBE dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja lain sesuai dengan indikator-indikator terkait unit kerja tersebut. Unit kerja yang terlibat selain Pusat Teknologi Informasi adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, Bagian Perencanaan, Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN, Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN, Bagian Administrasi Inspektorat Utama, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Arsip, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Bagian Pengaduan Masyarakat, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum, dan Pusat Perancangan Undang-Undang.

Pada bulan Juli 2023 juga dilakukan bimbingan teknis terkait pengisian arsitektur SPBE DPR RI. Setelah itu dilakukan pengisian arsitektur SPBE DPR RI menggunakan aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE yang telah disediakan oleh KemenPAN-RB. Kegiatan ini cukup memakan waktu karena data yang perlu diinput ke dalam sistem cukup banyak untuk nantinya dapat terlihat *dependency* datanya.

Evidence SPBE yang sudah terkumpul, di-submit ke sistem yang sudah disiapkan KemenPAN-RB di bulan Juli 2023. Kemudian tim penilai SPBE melakukan penilaian serta melakukan interviu untuk konfirmasi data *evidence* pada bulan September 2023. Setelah interviu, DPR RI diberi kesempatan untuk melakukan submit revisi data *evidence* pada tanggal 29 September 2023.

Dalam rangka mendukung SPBE DPR RI, maka telah disusun beberapa kebijakan maupun pedoman terkait seperti Persekjen No. 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Layanan Teknologi Informasi, SK No. 1787/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Perubahan RITIK Tahun 2020-2024, SK No. 2079/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Arsitektur Data, SK No. 2080/SEKJEN/2023 tentang Manajemen Pengetahuan SPBE, SK No. 2081/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi, SK No. 2082/SEKJEN/2023 tentang Kebijakan Umum Audit TIK, SK No. 2083/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan, serta SK No. 2084/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data. Selain itu telah disusun juga kebijakan tata kelola teknologi informasi berupa SOP.

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra

Tabel 11 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
Sangat Baik (3,57)	Sangat Baik (3,6)	99%	Sangat Tinggi

Untuk indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh tingkat kemajuan sebesar 99% jika dibandingkan dengan target akhir yang terdapat pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2021-2024.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi target akhir tersebut antara lain dengan menjalankan catatan rekomendasi hasil penilaian SPBE dan melaksanakan kegiatan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Penyelenggara SPBE Tahun 2023 yang ditetapkan dengan SK Nomor 1051/SEKJEN/2023.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional SPBE

Sasaran Program: Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik			
Indikator: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Rata-Rata Nasional 2023	Realisasi 2023	Capaian	Kategori
2,81	3,57	127%	Sangat Tinggi

Perbandingan nilai indeks SPBE yang diperoleh Setjen DPR RI jika dibandingkan dengan standar nasional, diperoleh hasil bahwa nilai SPBE Setjen DPR RI Tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional SPBE yang sebesar 2,81.

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 dari Kementerian PAN-RB, untuk kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, DPR menempati posisi ke-2 tertinggi dari 7 Lembaga. Sedangkan untuk kategori Kementerian dan Lembaga Pusat, DPR menempati peringkat ke-44 dari 130 K/L Pusat. Berdasarkan keseluruhan K/L/I nasional baik Pusat maupun Daerah, DPR berada di urutan ke 98 dari 621 instansi yang dievaluasi. Namun demikian, tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan senantiasa dilakukan untuk dapat mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tabel 13 Hasil Penilaian SPBE Tahun 2023 Kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,93	Baik
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3,57	Sangat Baik
3	Badan Pemeriksa Keuangan	3,19	Baik
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,63	Sangat Baik
5	Mahkamah Konstitusi	3,36	Baik
6	Komisi Yudisial	3,21	Baik
7	Dewan Perwakilan Daerah	2,24	Cukup
Rata-Rata		3,16	

(Sumber: KepmenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2024)

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 14 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: a. Melakukan kolaborasi dengan K/L lain dengan melakukan integrasi aplikasi menggunakan API; b. Melakukan klarifikasi daftar data dalam rangka	a. Melakukan Evaluasi Kebijakan Keamanan Informasi dengan menghasilkan Persekjen SMKI Nomor 4 Tahun 2023; b. Melakukan penyusunan Grand Desain Keamanan Informasi; c. Melakukan sertifikasi Audit ISO 27001:2022;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
						<ul style="list-style-type: none"> pembangunan satu data; c. Pembangunan dan launching portal Satu Data DPR; d. Pelaksanaan audit Keamanan SPBE internal yang berkolaborasi dengan Inspektorat Utama dan BSSN; e. Melakukan penyusunan Arsitektur SPBE pada aplikasi SIA SPBE KemenPAN-RB. 	<ul style="list-style-type: none"> d. Menyusun Kebijakan Manajemen Layanan TI dengan Persekjen No. 11 Tahun 2023; e. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Aplikasi, Infrastruktur dan Pusat Data dengan SK Sekjen; f. Mengukur Tingkat Kematangan Keamanan Siber dengan <i>tools Cyber Security Maturity (CSM)</i>.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 15 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%	515.050.000	509.073.000	98,84%

Pada sasaran Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik alokasi pagu pada tahun anggaran 2023 adalah Rp. 515.050.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 509.073.000,- dengan capaian 98,84%.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik” dengan indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut tercapai dengan kategori tinggi dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 98,84%.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan dengan penggunaan sumber daya anggaran ini adalah untuk honor Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sekretariat Jenderal DPR RI, jasa konsultan perencanaan tata kelola layanan TI, penyusunan arsitektur SPBE, serta Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan Informasi.

Adapun dalam pencapaian indikator ini juga dimanfaatkan penggunaan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan dukungan layanan SPBE, seperti:

1. pembentukan Tim Pengelola SPBE Tahun 2023 yang ditetapkan dengan SK Nomor 1051/SEKJEN/2023 untuk memudahkan koordinasi dan pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian mandiri SPBE;
2. penggunaan cloud.dpr.go.id sebagai media mengumpulkan bukti dukung dan berbagi dokumen digital sehingga menunjang penerapan teknologi informasi dan mengurangi penggunaan kertas; dan
3. pelaksanaan rapat koordinasi SPBE dengan jalur virtual sehingga dapat lebih efektif karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2023 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, yaitu:

1. Melakukan kegiatan persiapan untuk Sertifikasi ISO 27001:2022 dengan didahulukan kegiatan *Workshop* Internal Auditor ISO 27001:2022 dan Sertifikasi Internal Auditor ISO 27001:2022. Setelah melakukan pengumpulan *evidence* yang dibutuhkan untuk sertifikasi, selanjutnya dilakukan audit *stage 1 dan stage 2*. Pusat Teknologi Informasi berhasil mendapatkan sertifikat ISO 27001:2022, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku sampai 9 Juli 2026.
2. Melakukan pembuatan Dashboard Data Analitik yang meliputi Dashboard SDMA, Dashboard Dumas, Dashboard Pusbangkom, Dashboard Sentimen Analisis Media Sosial, dan Dashboard Harga Bahan Pokok. Selain itu telah dilakukan juga integrasi Data Harga Bahan Pokok dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
3. Melakukan penyusunan Arsitektur SPBE DPR RI pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE KemenPAN-RB dengan hasilnya terdapat 15 klaster pada Domain Arsitektur Proses Bisnis, 81 layanan pada Domain Arsitektur Layanan, 309 data pada Domain Arsitektur Data dan Informasi, 88 aplikasi pada Domain Arsitektur Aplikasi, 10 katalog yang telah dilengkapi pada Domain Arsitektur Infrastruktur (Infrastruktur bagian Platform, Infrastruktur bagian Sistem Integrasi, dan Infrastruktur bagian Fasilitas Komputasi), serta 7 katalog yang telah dilengkapi pada Domain Arsitektur Keamanan (Keamanan bagian Standar Teknis dan Prosedur SPBE, Keamanan bagian Penerapan Keamanan SPBE, dan Keamanan bagian Kelaiakan Keamanan SPBE).
4. Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Pengelola SPBE Tahun 2023 yang ditetapkan dengan SK Nomor 1051/SEKJEN/2023.
5. Melaksanakan asesmen indeks kematangan penanganan insiden *Cyber Security Maturity* (CSM) dari BSSN yang merupakan instrumen pengukuran Maturitas Penanganan Insiden Siber dan Sandi. Fase penilaian tingkat maturitas penanganan insiden terdiri dari Persiapan,

Respon atau tanggap Insiden Siber, dan Tindak Lanjut. Pada tahun 2023 DPR RI mendapatkan penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara atas pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber. DPR RI mengalami peningkatan nilai dari sebelumnya di tahun 2022 mendapat nilai 3,2 dan di tahun 2023 mendapat nilai 3,59 dengan capaian “Implementasi Terkelola”.

6. Menyelenggarakan *focus group discussion* dalam acara NGOPI (Ngobrol Seputar IT) terkait “Meningkatkan Keamanan Siber untuk Melindungi Data Dewan Perwakilan Rakyat” pada tanggal 13 April 2023 yang dihadiri oleh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI dengan menghadirkan para pakar yang bergerak di bidang keamanan teknologi informasi.
7. Menyelenggarakan acara NGOPI (Ngobrol Seputar IT) dalam rangka penyelenggaraan Forum Satu Data DPR RI pada tanggal 24 November 2023. Pada kegiatan ini, dilakukan penyepakatan Daftar Data DPR RI dengan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI, serta dilakukan peresmian Portal Satu Data DPR RI yang dapat diakses di <https://data.dpr.go.id/>.



Gambar 3 Foto Kegiatan Ngopi Edisi "Forum Satu Data DPR RI" dan Peresmian Portal Satu Data DPR RI

8. Menyelenggarakan kegiatan NGOPI (Ngobrol Seputar IT) Edisi: Keamanan Akun Media Sosial dengan mengadakan *Focus Group Discussion* yang berfokus pada pemanfaatan serta kewaspadaan dalam media sosial yang dihadiri oleh para admin media sosial seluruh Unit Kerja di lingkungan DPR RI dan narasumber dari pihak lembaga sertifikasi audit serta praktisi *white hacker* Indonesia.
9. menyusun kebijakan tata kelola teknologi informasi dalam bentuk Peraturan Sekjen, Keputusan Sekjen, dan daftar SOP, diantaranya telah menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Melalui Persekjen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Pusat Teknologi Informasi kepada para pemohon maupun pengguna layanan teknologi informasi di lingkungan DPR RI.
10. Secara kontinyu melaksanakan Audit TIK internal sejak tahun 2021. Dalam rangka pemenuhan SPBE, Pusat Teknologi Informasi sebagai unit kerja pengelola layanan SPBE telah melakukan audit TIK Infrastruktur dan Aplikasi secara internal menggunakan *tools* dari BRIN pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 Pustekinfo bersama Inspektorat Satu Setjen DPR RI telah melakukan audit TIK Keamanan sesuai dengan pedoman dari BSSN. Hasil dari audit akan membantu instansi pemerintah dalam melakukan perbaikan kualitas infrastruktur dan aplikasi SPBE dalam jangka panjang. Audit TIK bermanfaat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan sehingga Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar teknis serta peraturan perundangan yang berlaku, dan dapat mencegah terjadinya risiko atas penggunaan teknologi informasi. Hasil dari audit ini digunakan dalam pemenuhan indikator dalam penilaian SPBE yaitu indikator 29, 30, dan 31.

3.2. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Presentase Dukungan Teknologi Informasi)

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**”.

3.2.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 166 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja : Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				
Target Renstra Tahun 2023	Target PK Tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kategori
90%	90%	87%	97%	Sangat Tinggi

Pemenuhan terhadap indikator kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan melalui ketersediaan aplikasi dan sistem informasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dengan didukung juga pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI di seluruh wilayah DPR RI, pengembangan infrastruktur jaringan internet, dan pengembangan teknologi keamanan informasi. Indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah terlaksana dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 87% sehingga pencapaiannya adalah 97% (sangat tinggi).

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 177 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Tahun ke Tahun

Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
85%	100%	117%	85%	100%	117%	90%	87%	97%

Perbandingan capaian dari indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan hasil tercapainya target dengan baik, yakni. Namun di tahun 2023, realisasi mengalami penurunan yaitu 87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023 ini telah dilakukan penyesuaian definisi dengan kamus indikator Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 Revisi ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi). Bahwa penjelasan dari indikator kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI dilakukan dengan menghitung jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dibandingkan dengan seluruh aplikasi yang ada di Setjen DPR RI. Sedangkan pada tahun sebelumnya, perhitungan dari capaian indikator kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dihitung dari ketersediaan layanan teknologi informasi yang meliputi jaringan internet di seluruh lingkungan DPR RI yang dapat dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI.

Indikator ini sesuai kamus indikator hanya menghitung jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dibandingkan dengan seluruh aplikasi yang ada di Setjen DPR RI. Namun pada prinsipnya sebuah aplikasi sistem informasi tidak akan dapat diakses, dimanfaatkan atau digunakan oleh Anggota DPR RI jika tanpa didukung oleh ketersediaan jaringan internet untuk Anggota DPR RI, serta penerapan teknologi keamanan informasi yang melindungi data Anggota DPR RI. Sehingga pemanfaatan dukungan teknologi

informasi oleh DPR RI diukur capaiannya berdasarkan sub komponen yang terdapat pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kapustekinfo Tahun 2023, yakni meliputi:

1. Pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI, ASN Setjen DPR RI, dan TSP;
2. Pengembangan infrastruktur jaringan internet;
3. Pengembangan teknologi keamanan informasi, dan
4. Aplikasi yang digunakan untuk Anggota DPR RI

Adapun faktor yang menjadi pendorong realisasi kinerja pada indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu dengan meningkatkan layanan teknologi informasi, yakni menyediakan bandwidth jaringan internet sebesar 3,48 Gbps jalur internasional dan 5 Gbps jalur domestik yang terdiri dari 4 ISP dengan zonasi berdasarkan lokasi untuk peningkatan kualitas serta kecepatan akses internet dan untuk menunjang kegiatan rapat maupun persidangan secara virtual. Melakukan pengadaan Core Switch, Distribution Switch, Access Switch Wireless Access Point, penarikan jaringan internet serta perapihan jaringan internet di Komplek Parlemen guna meningkatkan ketersediaan akses jaringan internet di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu untuk menyediakan akses internet yang aman, diadakan Pusat Operasi Keamanan yang mengontrol laju trafik yang masuk dan keluar antara jaringan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan jaringan internet. Adapun aplikasi yang diperuntukkan kepada Anggota DPR RI antara lain Bale Aspirasi, Cloud, Email, Simfoni, SIDILAN, SIPERDANA, SIGOTA, SITANANG, PERJADIN, SIGAD.

3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra

Tabel 188 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia			
Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
87%	91%	96%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada tahun 2023 sebesar 87%. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 memiliki tingkat kemajuan sebesar 96%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebutuhan terhadap dukungan teknologi informasi yang semakin meningkat, diantaranya peningkatan terhadap pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi baik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan maupun kesetjenan, kebutuhan peningkatan kapasitas bandwidth untuk pelaksanaan rapat/persidangan virtual, peningkatan ketersediaan akses jaringan internet di lingkungan DPR RI, kebutuhan kapasitas penyimpanan (*storage*) server, peningkatan keamanan informasi untuk mencegah terjadinya insiden siber, serta peningkatan pada peralatan jaringan internet.

3.2.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 199 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%	87%	97%	<p>Faktor pendukung realisasi kinerja, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi di lingkungan DPR RI; b. Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan penambahan infrastruktur jaringan internet; c. Terlaksananya kegiatan pengembangan teknologi keamanan informasi. <p>Tantangan yang dihadapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan <i>engagement</i> penggunaan aplikasi oleh Anggota DPR RI 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeliharaan dan pengujian layanan jaringan internet dan perangkatnya untuk menjaga kualitas layanan teknologi informasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. Melakukan pengembangan dan penambahan infrastruktur jaringan internet; c. Melakukan dokumentasi dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan. d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada TA/SAA

Realisasi pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” adalah sebesar 87% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan senilai 90%. Berdasarkan sub komponennya yang terdapat pada Rencana Aksi Perjanjian

Kinerja Kapustekinfo Tahun 2023, maka detail keseluruhan dari capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 200 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi		
Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Realisasi
1. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	a. Pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI, ASN Setjen DPR RI, dan TSP	100%
	b. Pengembangan infrastruktur jaringan internet	100%
	c. Pengembangan teknologi keamanan informasi	100%
	d. Aplikasi yang digunakan untuk Anggota DPR RI	48%
Rata-Rata Capaian Keseluruhan		87%

Pada prinsip layanan teknologi informasi, sebuah aplikasi sistem informasi tidak akan dapat diakses, dimanfaatkan atau digunakan oleh Anggota DPR RI jika tanpa didukung oleh ketersediaan jaringan internet untuk Anggota DPR RI, serta penerapan teknologi keamanan informasi yang melindungi data Anggota DPR RI. Oleh karena itu analisis belum tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk menjalankan proses bisnis kesetjengan dan administrasi pemerintahan yang digunakan oleh ASN dan unit kerja Setjen DPR RI lebih banyak dibandingkan aplikasi yang secara spesifik ditujukan penggunaannya untuk Anggota DPR RI. Dari 88 aplikasi yang ada, sebanyak 42 aplikasi digunakan untuk Anggota DPR RI. Selain itu aplikasi yang ditujukan penggunaannya untuk Anggota DPR RI,

hanya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TA/SAA Anggota DPR RI.

3.2.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 211 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%	87%	97%	36.966.442.000	36.877.346.271	99,76%

Pada sasaran ini alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 36.966.442.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 36.877.346.271,-.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” dengan indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah terealisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 97% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,76% dengan menggunakan alokasi anggarannya untuk pelaksanaan Pengadaan License dan Support IP Locater, Konsultan Perencanaan Pengembangan Ruang Server, Pengadaan Switch Access, Pengadaan Wireless Access Point, Pengadaan Core Switch, Pengadaan Virewall VPN Concentrator, Pengadaan Samsung Flitz (Mondopad), Pengadaan Access Point Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Distributions Switch, Pengadaan Perangkat Pengolah

Data anggaran dan keuangan, Pengadaan Alat Penyimpanan Data TVR, Pengadaan Laptop untuk Perisalah, Pengadaan Wireless Access Point Kompleks Parlemen, Pengadaan SFP Connector Fiber Optic, Pengadaan SFP Connector Fiber Optic, Pengadaan Peralatan Pendukung Simfoni, Pengadaan Pusat Operasi Keamanan, Jasa Perancangan Jaringan FO, UTP dan Kelistrikan Perangkat Jaringan di Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jasa Integrator System Portal Satu Data DPR RI, Jasa Migrasi Hybrid Collaboration Single Sign On System, Perbaikan Instalasi Alat Pemadam Kebakaran, Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan, Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen, Pemeliharaan Wireless Access Point, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran Ruang Server, Pemeliharaan Server Telkom sigma DPR RI, Pemeliharaan Server Gedung DPR RI, Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno, Pemeliharaan Peralatan Command Center, Pengadaan Peralatan AC, Pengadaan Baterai UPS Ruang Server, Pengadaan dan Pengujian FM200, Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer, Pengadaan Peralatan Pranata Komputer dan Peralatan Monitoring, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Nusantara I, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Wisma Kopo, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Setjen DPR RI, Penarikan dan Perapihan Jaringan Internet Komplek Parlemen, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel UTP Gedung Nusantara, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Ruang Kerja, Pengadaan Lisensi Zoom Webinar dan Paripurna, Pengadaan License Analisis Kebijakan Parlemen, Pengadaan License Pengolahan Media Sosial, Pengadaan License Pengolahan Data Legislasi, Pengadaan License Kearsipan, Pengadaan License Pengolahan Data TV Parlemen, Pengadaan Renewal Support Link Controller, Pengadaan Renewal Support Core Switch dan Smartzone, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall di Gedung DPR RI, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall, Pengadaan Renewal Support and Subscription Security Colocation di Telkomsigma, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall Colocation Taman Tekno, Pengadaan Renewal Support Wireless Access Point,

Pengadaan License dan Support Ruckus Smartcell Insight, Pengadaan License Antivirus, Pengadaan License Software Office, Pengadaan License Software Sistem Operasi, Pengadaan License Software Perkantoran, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall Januari 2023, Renewal Software Backup, Pengadaan Lisensi Tableau Server dan Tenable Nessus, Pengadaan Pengukuran Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Setjen DPR RI, Pengadaan Aplikasi "Notulite Pro" Bagian Risalah, Pengembangan Website SDMA, Pengelola Proses Bisnis Data Analitik, Pengembangan Peralatan Command Center, Pengadaan Peralatan Virtual Meeting Command Center, Pengadaan Media Collaborator Command Center, Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pengelola Website Setjen, Sewa Ruang Penyimpanan Data Parlemen, Sewa Ruang Penyimpanan Dokumen Terpadu, Langganan Jasa Internet Dewan, Langganan Jasa Internet Setjen, Langganan Jasa Internet Colocation Telkomsigma, Langganan VPN IP Pusat Data Nasional, Langganan Jasa Internet Colocation Taman Tekno, Langganan WA Gateway Dewan, Langganan WA Gateway Setjen, Langganan SMS Gateway Dewan, Langganan WA Gateway, Langganan License VPN dan SSL, Langganan Jasa Internet Link Dukcapil, Pengadaan Perlengkapan Komputer Jaringan, Jasa Konsultan Perorangan Business Analyst, Jasa Konsultan Perorangan Data Scientist, Jasa Konsultan Perorangan Data Engineer, Jasa Konsultan Perorangan Data Analyst, Jasa Konsultan Perorangan IT Administrator, Jasa Konsultan Perorangan IT Technical Writer, Jasa Konsultan Perorangan Analytic Business Analyst, Jasa Konsultan Pengelola Model Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Teknologi Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Arsitektur Data Analitik, Jasa Konsultan Administrator Infrastruktur Data Analitik, Jasa Redesign Jaringan Access Point Wisma, Pengisian Fire Suppression System, Pengadaan peralatan kabel jaringan, Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan, Pengadaan Kabel UTP, Pengadaan Perlengkapan Patch Cord, Modular, dll, Pengadaan Perangkat Online Streaming, Pembangunan Aplikasi Satu Data DPR RI, Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Pendukung, Pembangunan Sistem Repositori Aset

Aplikasi Terintegrasi, Pengembangan Aplikasi Notula, Pengembangan Backend Website Setjen DPR RI, Pengembangan Aplikasi LMS Setjen DPR RI, dan Pengembangan Website AIPA.

3.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2023 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, yaitu:

1. memastikan ketersediaan dan redudansi serta memaksimalkan kinerja ruang pusat data dengan melakukan Sewa Ruang Penyimpanan Data Parlemen dan Sewa Ruang Penyimpanan Dokumen Terpadu;
2. menyediakan layanan internet di lingkungan DPR RI meliputi Langganan Jasa Internet Dewan, Langganan Jasa Internet Setjen, Langganan Jasa Internet Colocation Telkomsigma, Langganan Jasa Internet Colocation Taman Tekno, Langganan Jasa Internet Link Dukcapil, dan Langganan VPN IP Pusat Data Nasional;
3. meningkatkan dan mengembangkan layanan jaringan baik internal DPR RI maupun jaringan internet dengan melakukan Pengadaan Switch Access, Pengadaan Wireless Access Point Kompleks Parlemen, Pengadaan Core Switch, Pengadaan Firewall VPN Concentrator, Pengadaan Samsung Flitz (Mondopad), Pengadaan perangkat online streaming, Pengadaan Access Point Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Distribution Switch, Pengadaan Perangkat Pengolah Data anggaran dan keuangan, Pengadaan Laptop untuk Perisalah, Pengadaan Alat Penyimpanan Data TVR, Pengadaan Smart Display Biro Umum, Pengadaan Monitoring Device, Pengadaan peralatan kabel jaringan, Pengadaan Peralatan Komputer Jaringan, Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan, Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer, Pengadaan Kabel UTP, Pengadaan peralatan AC, Pengadaan Baterai

UPS Ruang Server, Pengadaan dan pengujian FM200, Pengisian FM200, Pengadaan Peralatan Pranata Komputer dan Peralatan Monitoring, Pengadaan Perlengkapan Patch Cord, Modular, dll, Pengadaan SFP Connector Fiber Optic, Pengadaan Upgrade Computing Big Data, Pengadaan Peralatan Pendukung Simfoni, Pengadaan Pusat Operasi Keamanan, Pengadaan Peralatan Virtual Meeting Command Center, Pengadaan Media Collaborator Command Center, Perbaikan Instalasi Alat Pemadam Kebakaran, Pengisian Fire Suppression System, Pengembangan Peralatan Command Center;

4. melakukan pengembangan jaringan dengan melakukan Penarikan dan perapihan Jaringan kabel Nusantara I, Penarikan dan perapihan Jaringan kabel Wisma Kopo, Penarikan dan perapihan Jaringan kabel Gedung Setjen DPR RI, Penarikan dan perapihan Jaringan kabel FO Gedung Nusantara, Penarikan dan perapihan Jaringan kabel UTP Gedung Nusantara, Penarikan dan perapihan Jaringan kabel Ruang Kerja, Penarikan dan Perapihan Jaringan Internet Komplek Parlemen guna meningkatkan ketersediaan akses jaringan internet di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. melakukan pemeliharaan infrastruktur secara rutin meliputi Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan, Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen, Pemeliharaan Wireless Access Point, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran Ruang Server, Pemeliharaan Server Telkom Sigma DPR RI, Pemeliharaan Server Gedung DPR RI, Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno, Pemeliharaan Peralatan Command Center;
6. memastikan perangkat yang digunakan selalu mendapat pembaharuan dan dukungan dengan melakukan Pengadaan Renewal Subscription Firewall Data Center, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall, Pengadaan Renewal Support Link Controller, Pengadaan Renewal Support Core Switch dan Smartzone, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall di Gedung DPR RI,

Pengadaan Renewal Support and Subscription Security Colocation di Telkomsigma, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall Colocation Taman Tekno, Pengadaan Renewal Support Wireless Access Point, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall Januari 2023, Renewal Software Backup;

7. memastikan penggunaan perangkat lunak dengan fitur penuh dengan pengadaan lisensi meliputi Pengadaan Lisensi Zoom Webinar dan Paripurna, Pengadaan License dan Support IP Locater, Pengadaan License Analis Kebijakan Parlemen, Pengadaan License Pengolahan Media Sosial, Pengadaan License Pengolahan Data Legislasi, Pengadaan License Kearsipan, Pengadaan License Pengolahan Data TV Parlemen, Pengadaan License dan Support Ruckus Smartcell Insight, Pengadaan License Antivirus, Pengadaan License Software Office, Pengadaan License Software Sistem Operasi, Pengadaan License Software Perkantoran, Pengadaan Lisensi Tableau Server dan Tenable Nessus, Langgan License VPN dan SSL;
8. memberikan layanan informasi melalui Langgan WA Gateway Dewan, Langgan WA Gateway Setjen, Langgan WA Gateway, Langgan SMS Gateway Dewan;
9. menggunakan jasa konsultan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mengembangkan strategi teknologi informasi meliputi Konsultan Perencanaan Pengembangan Ruang Server, Jasa Konsultan Perorangan Business Analyst, Jasa Konsultan Perorangan Data Scientist, Jasa Konsultan Perorangan Data Engineer, Jasa Konsultan Perorangan Data Analyst, Jasa Konsultan Perorangan IT Administrator, Jasa Konsultan Perorangan IT Technical Writer, Jasa Konsultan Perorangan Analytic Business Analyst, Jasa Konsultan Pengelola Model Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Teknologi Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Arsitektur Data Analitik, Jasa Konsultan Administrator Infrastruktur Data Analitik, Jasa Perancangan Jaringan FO, UTP dan Kelistrikan Perangkat Jaringan di Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jasa

Integrator System Portal Satu Data DPR RI, Jasa Migrasi Hybrid Collaboration Single Sign On System, Jasa Redesign Jaringan Access Point Wisma.

3.3. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Presentase Aplikasi yang Terintegrasi)

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Persentase aplikasi yang terintegrasi**”.

3.3.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 222 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja : Persentase aplikasi yang terintegrasi				
Target Renstra Tahun 2023	Target PK Tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kategori
95%	95%	96%	101%	Sangat Tinggi

Persentase aplikasi yang terintegrasi diwujudkan dalam pencapaian akan indikator kinerja jumlah aplikasi/website yang dibangun/dikembangkan di unit-unit kerja oleh Pusat Teknologi Informasi. Menggunakan relasi matriks dari struktur database dan interoperabilitas data yang digunakan antar aplikasi, telah tercapai 96% aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan total aplikasi keseluruhan berjumlah 88 aplikasi. Kegiatan telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya adalah 101%.

3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 233 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Aplikasi yang Terintegrasi dari Tahun ke Tahun

Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
90%	92%	102%	90%	95%	105%	95%	96%	101%

Dalam tiga tahun terakhir, terdapat tren positif dalam pencapaian indikator “Persentase aplikasi yang terintegrasi”. Capaian dari Tahun ke Tahun berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, terjadi pencapaian sebesar 102% dengan realisasi 92% dari target 90%, diikuti oleh peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan pencapaian 105% dengan realisasi sebesar 95% dari target 90%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana meskipun target dinaikkan menjadi 95%, Indikator Persentase Aplikasi berhasil mencapai tingkat realisasi sebesar 96% (melampaui target) dengan capaian sebesar 101%. Nilai capaian yang turun pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bukanlah dikarenakan penurunan kinerja, melainkan karena angka pembagi perhitungan terhadap jumlah seluruh aplikasi yang semakin berkurang setelah dilakukan integrasi dan penyederhanaan dengan *clustering* aplikasi. Oleh karena itu jumlah seluruh aplikasi yang semakin sedikit namun saling terintegrasi dan sederhana akan lebih efektif dan efisien baik dari sisi pemeliharaan dan operasionalnya dibandingkan dengan jumlah aplikasi yang banyak dan sporadis.

Upaya-upaya yang dilakukan setiap tahunnya, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan, memberikan hasil positif dan menunjukkan kemajuan yang baik dalam mencapai indikator “Persentase aplikasi yang terintegrasi”.

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator Persentase aplikasi yang terintegrasi, yakni:

1. Efisiensi manajemen data melalui pengelompokan aplikasi ke dalam 15 cluster. Lebih lanjut, keterpaduan terjadi dengan membangun SuperApp sesuai Peta Jalan Evaluasi RITIK dan Arsitektur Data, menghubungkan rencana strategis organisasi dengan pengembangan teknologi.
2. Perubahan proses bisnis di beberapa unit kerja juga menjadi faktor penyederhanaan dari banyaknya aplikasi yang ada.
3. Dengan adanya tren SPBE dengan aplikasi berbagi pakai yang harus digunakan, berdampak pada berkurangnya aplikasi-aplikasi sejenis di internal setjen DPR yang harus dinonaktifkan atau dilakukan integrasi.

3.3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra

Tabel 244 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Persentase Aplikasi yang Terintegrasi			
Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
96%	96%	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” pada tahun 2023 sebesar 96%. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 maka tingkat kemajuannya sebesar 100% atau telah tercapai.

3.3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 255 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	95%	96%	101%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: a. memiliki RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dengan Peta Jalan TIK sebagai acuan	a. melakukan evaluasi dan penyisiran terhadap seluruh aplikasi terkait status aktif dan update

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
						<p>dalam pembangunan/pengembangan aplikasi;</p> <p>b. melakukan pengembangan framework dan restrukturisasi <i>database</i> aplikasi;</p> <p>c. kolaborasi dengan aplikasi terintegrasi dan berbagi pakai dari K/L/I lainnya.</p>	<p>penggunaan aplikasi;</p> <p>b. menyesuaikan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan kebutuhan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan terbaru;</p> <p>c. melakukan tertib dokumentasi dalam siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi.</p>

3.3.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 266 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	95%	96%	101%	13.392.009.000	13.358.732.847	99,75%

Pada sasaran ini alokasi anggaran sesuai pagu yang digunakan sebesar Rp. 13.392.009.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 13.358.732.847,-.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” telah diselenggarakan dipdengn efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 101% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar

99,75%. Alokasi anggaran pembangunan dan pengembangan sistem informasi, redesain website, pengembangan framework, dan restrukturisasi database aplikasi, serta belanja modal lainnya dilakukan untuk mendukung transformasi teknologi yang komprehensif. Pengalokasian dana untuk pembangunan aplikasi sistem informasi mencerminkan investasi dalam inovasi teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Redesain website menjadi bagian integral dari strategi digital, menekankan pentingnya tampilan dan fungsionalitas yang modern guna meningkatkan pengalaman pengguna. Pengembangan framework mendapat perhatian khusus untuk memastikan fondasi teknologis yang kuat dan scalable. Restrukturisasi database aplikasi diarahkan pada optimalisasi manajemen data, memastikan keterpaduan dan kecepatan akses.

3.3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2023 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi”, yaitu:

1. melakukan transisi framework aplikasi dari Zend Framework ke Laravel. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang, memastikan kelenturan dalam pengembangan, dan mendukung integrasi aplikasi dengan lebih efektif;
2. melalui pengelompokan aplikasi menjadi 15 cluster, pembangunan SuperApp, dan restrukturisasi database aplikasi, Pusat Teknologi Informasi telah menciptakan dasar yang kokoh untuk integrasi aplikasi. Langkah ini memungkinkan identifikasi peluang integrasi yang lebih baik dan memberikan landasan yang solid untuk pengembangan aplikasi yang lebih terpadu;

3. sebanyak 26 aplikasi sistem informasi telah berhasil dikembangkan, mencakup 17 aplikasi yang merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, dan 9 aplikasi baru yang diusulkan;
4. melakukan restrukturisasi database dalam upaya pengoptimalisasian proses manajemen data yang efisien. Fokus diberikan pada keterpaduan dan kecepatan akses data guna mendukung integrasi aplikasi menjadi lebih baik.

3.4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Indeks Kepuasan Anggota DPR RI)

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi**”.

3.4.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 277 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja :				
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi				
Target Renstra Tahun 2023	Target PK Tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kategori
3,31	3,31	3,69	111%	Sangat Tinggi

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi diperoleh melalui survei kepuasan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 dengan kategori teknologi informasi.

Pelaksanaan survey terkait layanan Pusat Teknologi Informasi telah melingkupi responden yang dipersyaratkan dengan pengguna layanan meliputi Anggota DPR RI periode 2019–2024, yang pada saat survei dilakukan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, Mitra Setjen DPR RI, merupakan seluruh unsur yang membutuhkan dan/atau menerima layanan Setjen DPR RI serta masyarakat umum. Jumlah keseluruhan responden adalah 329 dengan pelaksanaan metode manual, *link* dan *barcode*.

Adapun hasil dari nilai IKM Pusat Teknologi Informasi adalah 91,229 dengan kategori Sangat Baik dan jika dikonversi menjadi nilai indeks adalah 3,69 lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 3,31. Sehingga indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan pencapaian sebesar 111%.

3.4.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 288 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi dari Tahun ke Tahun

Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3,10	3,23	104%	3,10	3,31	106%	3,31	3,69	111%

Perbandingan capaian dari indikator “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi” selama tiga tahun terakhir menunjukkan selalu tercapai target yang ditetapkan dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2023 dengan capaian yang diperoleh sebesar 111%.

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi ini adalah peningkatan pada ketersediaan produk spesifikasi layanan teknologi informasi, sarana prasarana yang disediakan, persyaratan dan waktu kecepatan pelayanan yang diberikan oleh Pusat Teknologi Informasi.

3.4.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra

Tabel 299 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi			
Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
3,69	3,32	111%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi” pada tahun 2023 sebesar 3,69. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 maka tingkat kemajuannya sebesar 111% atau telah tercapai.

3.4.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 300 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,31	3,69	111%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: a. adanya peningkatan kapasitas internet terutama untuk area publik dengan potensi jumlah pengguna yang banyak; b. menyediakan platform layanan berbasis aplikasi dan website yang terintegrasi dan penyampaian informasi pada laman DPR RI	a. menindaklanjuti rekomendasi dan masukan dari Anggota DPR terkait layanan pusat teknologi informasi; b. meningkatkan penguatan keamanan informasi untuk menjaga integritas data; c. meningkatkan profesionalitas SDM untuk mengakomodir perkembangan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
						yang <i>realtime</i> dan <i>up to date</i> ; c. kecepatan dan ketepatan dalam penanganan gangguan layanan teknologi informasi.	informasi dan teknologi.

3.4.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Terkait analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tidak ada penggunaan anggaran pada kegiatan pemenuhan indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi” di lingkup tugas Pusat Teknologi Informasi karena kegiatan ini dikoordinir oleh unit kerja yang mengelola pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.4.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Layanan teknologi informasi yang disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi bagi Anggota DPR RI diantaranya sebagai berikut:

1. Layanan jaringan internet;
2. Layanan email dengan domain @dpr.go.id;
3. Layanan cloud storage;
4. Layanan website DPR RI;
5. Layanan SMS dan WA *Gateway*;
6. Layanan Data Digital Persidangan Terintegrasi yang merupakan integrasi aplikasi SIPERDANA dan SIMFONI untuk mendukung pelaksanaan persidangan dan rapat kerja;
7. Layanan dashboard data analitik untuk Anggota DPR;
8. Layanan penanganan gangguan jaringan internet.

Hasil survei kepuasan Anggota DPR RI atas layanan teknologi informasi melampaui target yang ditetapkan. Jumlah responden yang dilakukan survei sebanyak 329 responden pada periode pelaksanaan Januari s.d September 2023 dengan perolehan hasil unsur penilaian layanan Pusat Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Hasil Survey IKM Layanan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023

Unsur Penilaian	Hasil Survey
Persyaratan	95,258
Sistem Mekanisme, Prosedur	94,817
Waktu Kecepatan	95,254
Tarif Biaya	93,556
Produk Spesifikasi Layanan	94,354
Kompetensi SDM	93,563
Perilaku SDM	93,670
PSM	92,781
Sarana Prasarana	94,050
TOTAL IKM	91,229
Kategori	Sangat Baik

3.5. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Presentase Realisasi Anggaran)

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi**”.

3.5.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

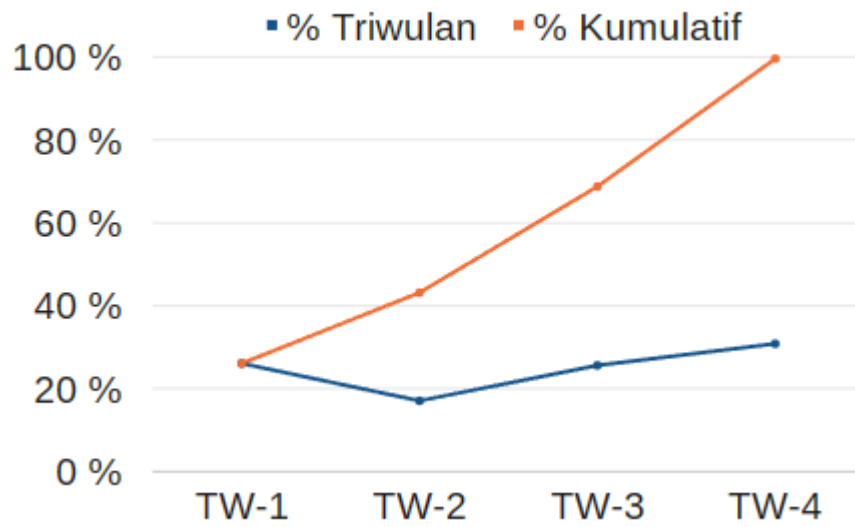
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja : Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi			
Target PK Tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kategori
95%	99,59%	104%	Sangat Tinggi

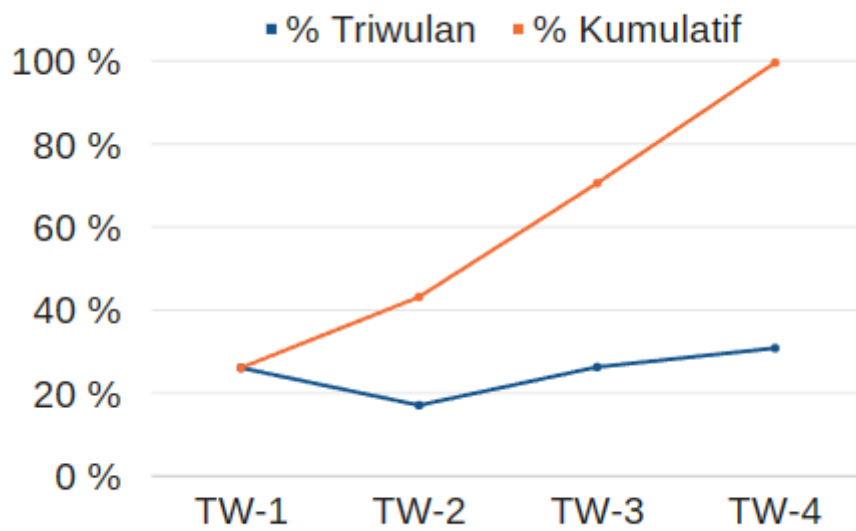
Pada tahun 2023 Pusat Teknologi Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.672.789.000,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran sejak Triwulan I hingga Triwulan IV adalah sebesar Rp. 57.434.426.470,- (lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Sehingga apabila dihubungkan dengan target yang ingin dicapai pada indikator “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” pada Tahun 2023, diperoleh nilai capaian realisasi anggaran sebesar 104%. Adapun rincian realisasi anggaran dari Pusat Teknologi Informasi pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terdapat pada Lampiran dan realisasi per triwulan dan kumulatif ditampilkan pada .

Tabel 333 Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi per Triwulan dan Kumulatif Tahun 2023

PTI – Pusat Teknologi Informasi Pagu Anggaran: Rp. 57.672.789.000						
Triwulan	Realisasi Anggaran per Triwulan (Rp)	Realisasi Anggaran Kumulatif (Rp)	% Triwulan	% Kumulatif	Kenaikan Realisasi Kumulatif	Keterangan
TW-I	15.042.091.597	15.042.091.597	26,08%	26,08%	-	
TW-II	9.842.485.394	24.884.576.991	17,07%	43,15%	Naik sebesar 17,07%	
TW-III	14.768.760.736	39.653.337.727	25,61%	68,76% (sebelum blokir)	Naik sebesar 25,61%	
			26,27%	70,53% (setelah blokir)	Naik sebesar 27,38%	Nilai Pagu yang di Blokir sebesar Rp. 1.450.000.000 Pagu Total setelah Blokir sebesar Rp 56.222.789.000
TW-IV	17.781.088.743	57.434.426.470	30,83%	99,59%	Naik sebesar 29,06%	Sisa Anggaran: Rp. 238.362.530 atau 0.41% dari pagu



Gambar 4 Grafik Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi per Triwulan Tahun 2023 (Sebelum Blokir)



Gambar 5 Grafik Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi per Triwulan Tahun 2023 (Setelah Blokir)

Berdasarkan Tabel 33 Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi per Triwulan dan Kumulatif Tahun 2023, maka serapan anggaran Pusat Teknologi Informasi secara kumulatif mengalami kenaikan realisasi yang seiring dengan peningkatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Namun pada realisasi per triwulan terjadi penurunan realisasi di TW-II yaitu penyerapan anggaran di TW-II saja sebesar RP. 9.842.485.394,- atau 17,07% dari pagu anggaran. Hal ini terjadi karena sebagian kegiatan telah selesai dilaksanakan pada TW-II dan sebagian lagi kegiatan masih berlangsung.

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan :

1. Rapat-rapat dengan unit kerja lainnya, rapat-rapat dengan Kementerian/Intansi lainnya : BSSN, Dukcapil Kemendagri, Kemenpan, Kominfo.
2. Pelaksanaan Zona Integritas
3. Menghadiri Seminar/Workshop pelatihan bagi Pranata Komputer
4. Pengelolaan PPNASN
5. Implementasi ISO 27001 Pustekinfo.
6. Monitoring Storage Big Data, Taman Tekno, Serpong.
7. Benchmarking ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait ISO 27001.
8. Monitoring Storage Simfoni di Telkom Sigma, Serpong.
9. Penyusunan Persekjen Sistem Management Keamanan Informasi (SMKI).
10. Pengadaan Renewal Support Dan Subscription Security Colocation Di Telkomsigma.
11. Pengadaan Renewal Support Wireless Access Point.
12. Pengadaan Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno.
13. Langgan WA Gateway Setjen.
14. Pengadaan License Antivirus
15. Pengadaan Upgrade Computing Big Data
16. Pengadaan Renewal Support Core Switch Dan Smartzone

17. Jasa Konsultan Perorangan Analitik It Administrator
18. Jasa Konsultan Perorangan Analitik Business Analyst
19. Jasa Konsultan Perorangan Analitik Data Scientist
20. Jasa Konsultasi Perorangan Analitik Data Engineer
21. Jasa Konsultasi Perorangan Analitik Data Analyst
22. Jasa Konsultasi Perorangan It Technical Writer
23. Pengadaan Perlengkapan Tenaga Sistem Pendukung TA 2023.

Kegiatan yang sedang berlangsung pada TW-II Bidang TKTI:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerjasama Pemanfaatan Data Dukcapil.
2. Tim Pengelola Command Center DPR RI Tahun 2023.
3. Tim Pengelola Website SETJEN DPR RI TA 2023.
4. Tim Pengelola Satu Data DPR RI TA 2023.
5. Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) SETJEN DPR RI TA 2023.

Kegiatan yang sedang berlangsung sampai Desember, namun telah selesai proses kontrak pada TW-II Bidang SIINTI:

1. Langganan Jasa Internet Dewan
2. Langganan Jasa Internet Setjen
3. Sewa Ruang Penyimpanan Dokumen Terpadu
4. Sewa Ruang Penyimpanan Data Parlemen
5. Langganan Jasa Internet Colocation Telkomsigma
6. Langganan Jasa Internet Colocation Taman Tekno
7. Pemeliharaan AC Ruang Server
8. Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen
9. Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan
10. Pemeliharaan Peralatan Command Center
11. Pemeliharaan Server Gedung DPR RI

Pada TW-III Pusat Teknologi Informasi mengalami blokir anggaran (clearance) senilai Rp. 1.450.000.000,- sehingga pagu total setelah dikurangi blokir sebesar Rp 56.222.789.000,-. Realisasi pada TW-III saja sebesar Rp. 14.768.760.736,- yakni 25,61% (sebelum blokir) atau 26,27% (setelah blokir). Peningkatan penyerapan realisasi anggaran terjadi pada TW-IV setelah dibukanya blokir anggaran dengan realisasi pada TW-IV saja sebesar Rp. 17.781.088.743,- atau 30,83%. Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan yang tadinya terkena blokir baru dapat dilaksanakan setelah blokir dibuka yaitu pada TW-IV. Sehingga realisasi kumulatif total Pusat Teknologi Informasi adalah Rp. 57.434.426.470,- atau 99,59% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 238.362.530,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau 0.41% dari total pagu (sebelum blokir).

Tabel 344 Perbandingan Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi Tahun 2021, 2022 dan 2023

2021			2022			2023		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
152.111.153.000	150.918.053.567	99,22	72.748.422.000	72.317.351.744	99,41	57.672.789.000	57.434.426.470	99,59

(Sumber: Pusat Teknologi Informasi, 2023)

Pagu anggaran Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 57.672.789.000,-. Realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 57.434.426.470,- atau 99,59%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2022, maka terjadi peningkatan sebesar 0,18%.

3.5.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 355 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi dari Tahun ke Tahun

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian	Target
2023	57.672.789.000	57.434.426.470	99,59%	95%
2022	72.748.422.000	72.317.351.744	99,41%	93%
2021	152.111.153.000	150.918.053.567	99,22%	92,5%
2020	22.259.214.000	20.693.678.175	92,97%	90%

Perbandingan capaian dari indikator “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” selama tiga tahun terakhir menunjukkan selalu mencapai target dan terdapat peningkatan realisasi capaian dari target tahun sebelumnya. Capaian realisasi anggaran pada tahun 2023 diperoleh sebesar 99,59%.

3.5.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra

Terkait dengan indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi, tidak terdapat perbandingan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, karena indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi tidak tercantum pada Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 Revisi Ke-2.

Namun jika disandingkan dengan target yang terdapat pada Renja K/L Tahun Anggaran 2023 unit organisasi Pusat Teknologi Informasi yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 57.672.789.000,- dengan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 57.434.426.470,- maka mendapat tingkat kemajuan sebesar 99,59% (sangat tinggi).

Tabel 366 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Persentase Aplikasi yang Terintegrasi			
Realisasi 2023	Target Renja K/L 2023	Tingkat Kemajuan	Kategori
57.434.426.470	57.672.789.000	99,59%	Sangat Tinggi

3.5.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat standar nasional perbandingan anggaran layanan teknologi informasi untuk indikator kinerja “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.5.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 377 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	95%	99,59%	104%	Faktor keberhasilan antara lain: a. Evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran setiap triwulan; b. Perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja; c. Perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi.	Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja perencanaan dan anggaran serta K/L terkait clearance anggaran (KemenPAN-RB, Kemkominfo, dan Kementerian PPN/Bappenas)

3.5.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 388 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	95%	99,59%	104%	57.434.426.470	57.672.789.000	99,59%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” dengan indikator kinerja “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 99,59% dengan persentase capaian anggaran yakni 104%.

3.5.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian persentase realisasi anggaran pada Pusat Teknologi Informasi yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan didukung oleh penggunaan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa konsultan untuk Audit ISO 27001:2022, Penyusunan Jaringan, Pengadaan Infrastruktur Jaringan, Perencanaan Pengembangan Ruang Server; Layanan Arsitektur SPBE, Penyusunan Grand Desain Keamanan Informasi, Operasional dan Pemeliharaan Data dan Teknologi Informasi;
2. Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data DPR RI, Sosialisasi Keamanan Media Sosial;
3. Rapat-rapat koordinasi antar bidang di Pusat Teknologi Informasi, antar unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maupun dengan K/L/I lainnya dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi seperti penyusunan kebijakan teknologi informasi, pengisian indeks keamanan informasi, indeks kematangan insiden siber, penilaian mandiri SPBE, dan audit teknologi informasi;
4. Seminar/*workshop* teknis untuk pengembangan kompetensi pranata komputer seperti sertifikasi Internal Auditor (CIA), pengembangan framework aplikasi, *workshop captive portal* dan terkait pengembangan infrastruktur teknologi informasi;

5. Pelaksanaan studi implementasi dalam rangka Pengelolaan Layanan SPBE, Portal Satu Data, dan Data Analitik ke beberapa pemerintah daerah, diantaranya Yogyakarta, Banda Aceh, Mandalika, Hulu Rokan, dan Dumai;
6. Perjalanan dinas dalam rangka *monitoring data center* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring penerapan SOP Data Center Colocation di Telkom Sigma dan Colocation di Taman Tekno Lintasarta, Serpong;
7. Pembiayaan honor Tim Pengelola *Command Center* DPR RI, Tim Satu Data DPR RI, CSIRT, Pengelola Website Setjen;
8. Langganan Jasa Internet Dewan, Langganan Jasa Internet Setjen, Langganan Jasa Internet Colocation Telkomsigma, Langganan VPN IP Pusat Data Nasional, Langganan Jasa Internet Colocation Taman Tekno, Langganan WA Gateway Dewan, Langganan WA Gateway Setjen, Langganan SMS Gateway Dewan, Langganan WA Gateway, Langganan License VPN dan SSL, Langganan Jasa Internet Link Dukcapil;
9. Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan, Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen, Pemeliharaan Wireless Access Point, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran Ruang Server, Pemeliharaan Server Telkom sigma DPR RI, Pemeliharaan Server Gedung DPR RI, Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno, Pemeliharaan Peralatan Command Center;
10. Pengadaan beberapa perangkat jaringan seperti Pengadaan Switch Access, Pengadaan Wireless Access Point, Pengadaan Core Switch, Pengadaan Virewall VPN Concentrator, Pengadaan Samsung Flitz (Mondopad), Pengadaan Access Point Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Distributions Switch, Pengadaan Perangkat Pengolah Data anggaran dan keuangan, Pengadaan Alat Penyimpanan Data TVR, Pengadaan Laptop untuk Perisalah, Pengadaan Wireless Access Point Kompleks Parlemen, Pengadaan SFP Connector Fiber Optic, Pengadaan

Peralatan Pendukung Simfoni, Pengadaan Upgrade Computing Big Data, Pengadaan Pusat Operasi Keamanan, Pengadaan Peralatan AC, Pengadaan Baterai UPS Ruang Server, Pengadaan dan Pengujian FM200, Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer, Pengadaan Peralatan Pranata Komputer dan Peralatan Monitoring, Pengadaan Perlengkapan Komputer Jaringan, Pengadaan peralatan kabel jaringan, Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan, Pengadaan Kabel UTP, Pengadaan Perlengkapan Patch Cord, Modular, dll;

11. Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Nusantara I, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Wisma Kopo, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Setjen DPR RI, Penarikan dan Perapihan Jaringan Internet Komplek Parlemen, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel UTP Gedung Nusantara, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Ruang Kerja;
12. Pengadaan License dan Support IP Locater, Pengadaan Lisensi Zoom Webinar dan Paripurna, Pengadaan Lisensi Tableau Server dan Tenable Nessus, Pengadaan License Analisis Kebijakan Parlemen, Pengadaan License Pengolahan Media Sosial, Pengadaan License Pengolahan Data Legislasi, Pengadaan License Kearsipan, Pengadaan License Pengolahan Data TV Parlemen, Pengadaan License dan Support Ruckus Smartcell Insight, Pengadaan License Antivirus, Pengadaan License Software Office, Pengadaan License Software Sistem Operasi, Pengadaan License Software Perkantoran;
13. Pengadaan Renewal Support Link Controller, Pengadaan Renewal Support Core Switch dan Smartzone, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall di Gedung DPR RI, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall, Pengadaan Renewal Support and Subscription Security Colocation di Telkomsigma, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall Colocation Taman Tekno, Pengadaan Renewal Support Wireless Access Point, Pengadaan

- Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall Januari 2023, Renewal Software Backup;
14. Sewa Ruang Penyimpanan Data Parlemen, Sewa Ruang Penyimpanan Dokumen Terpadu;
 15. Konsultan Perencanaan Pengembangan Ruang Server, Jasa Perancangan Jaringan FO, UTP dan Kelistrikan Perangkat Jaringan di Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jasa Integrator System Portal Satu Data DPR RI, Jasa Migrasi Hybrid Collaboration Single Sign On System, Jasa Konsultan Perorangan Business Analyst, Jasa Konsultan Perorangan Data Scientist, Jasa Konsultan Perorangan Data Engineer, Jasa Konsultan Perorangan Data Analyst, Jasa Konsultan Perorangan IT Administrator, Jasa Konsultan Perorangan IT Technical Writer, Jasa Konsultan Perorangan Analytic Business Analyst, Jasa Konsultan Pengelola Model Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Teknologi Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Arsitektur Data Analitik, Jasa Konsultan Administrator Infrastruktur Data Analitik, Jasa Redesign Jaringan Access Point Wisma;
 16. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pengelola Website Setjen;
 17. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Rumah pimpinan, RJA Kalibata, dan RJA Ulujami), Perjalanan dinas dalam Rangka Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan IT (Wisma Griya Sabha Kopo, Data Center Telkom Sigma, dan Data Center Taman Tekno), dan perjalanan dinas untuk *workshop*;
 18. Pembangunan Aplikasi Satu Data DPR RI, Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Pendukung, Pembangunan Sistem Repositori Aset Aplikasi Terintegrasi;
 19. Pengembangan Peralatan Command Center, Pengadaan Peralatan Virtual Meeting Command Center, Pengadaan Media Collaborator Command Center;
 20. Perbaikan Instalasi Alat Pemadam Kebakaran;

21. Pengadaan Pengukuran Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Setjen DPR RI;
22. Pengadaan Aplikasi "Notulite Pro" Bagian Risalah;
23. Pengelola Proses Bisnis Data Analitik;
24. Pengisian Fire Suppression System;
25. Pengadaan Perangkat Online Streaming;
26. Pengembangan Website SDMA;
27. Pengembangan Aplikasi Notula;
28. Pengembangan Backend Website Setjen DPR RI;
29. Pengembangan Aplikasi LMS Setjen DPR RI;
30. Pengembangan Website AIPA;
31. Pembangunan Aplikasi Satu Data DPR RI;
32. Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Pendukung.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang membawahi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, dengan masing-masing bidang memiliki kelompok jabatan fungsional Pranata Komputer.

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Teknologi Informasi. Laporan ini menyajikan keberhasilan, capaian maupun kendala yang dihadapi oleh segenap jajaran yang berada dalam unit kerja ini selama tahun anggaran 2023. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin baik dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja yang diturunkan dari sasaran program dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi.

Pada 2023, Kepala Pusat Teknologi Informasi memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang diturunkan ke dalam sasaran program Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Indikator kinerja ini direpresentasikan dalam bentuk capaian *outcome*. Secara umum, tingkat keberhasilan kinerja kegiatan Pusat Teknologi Informasi tampak pada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2023 dapat dilakukan sesuai target.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Teknologi Informasi yang telah dilakukan oleh dua Bidang unit kerja yakni Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi memberikan kenaikan capaian

realisasi penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2023 dengan capaian sebesar 99,59% dan realisasi anggaran keseluruhan Rp 57.434.426.470,-.

Bertujuan dalam mengantisipasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi agar tercapai kinerja yang ditargetkan, maka Kepala Pusat Teknologi Informasi menetapkan kebijakan antara lain:

- a. melakukan identifikasi tentang rencana kegiatan dan penyusunan anggaran baik untuk tahun yang akan datang maupun revisi anggaran pada tahun berjalan;
- b. menyusun dan melengkapi dokumen kerangka acuan serta dokumen pendukung kegiatan lainnya pada proses penyusunan rencana kerja unit;
- c. berkoordinasi secara aktif dengan unit kerja terkait perencanaan dan penganggaran serta K/L (KemenPAN-RB, Kemkominfo, Kementerian PPN/Bappenas) dalam rangka penyusunan rencana kerja dan proses clearance anggaran;
- d. bermitra dan berkonsultasi secara aktif kepada unit kerja yang melakukan pengawasan internal terkait permasalahan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
- e. memastikan setiap kegiatan dilakukan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) dan mempunyai *outcome* serta *output* yang jelas;
- f. memastikan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara efektif;
- g. memastikan bahwa kegiatan didokumentasikan dengan teratur dan baik serta pertanggungjawaban dilakukan tepat waktu.

4.2. Rekomendasi

Hasil capaian dari indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi sudah melampaui target dengan kategori capaian “sangat tinggi”. Namun perlu ada perbaikan yang berkelanjutan untuk keberhasilan kinerja di tahun depan. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan diantaranya:

- a. Berkoordinasi dengan unit kerja yang mengelola kinerja organisasi dan reformasi birokrasi serta unit kerja yang mengelola perencanaan dan anggaran dalam menentukan Indikator Kinerja Utama Pusat Teknologi Informasi beserta penjelasan definisi indikator yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) agar tercipta ukuran target dan capaian yang realistis, efektif, dan efisien secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.
- b. Berkoordinasi dengan unit kerja yang mengelola kepegawaian, jabatan fungsional Pranata Komputer, serta pemetaan beban kerja dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pusat Teknologi Informasi;
- c. Menyelenggarakan Forum Satu Data DPR RI dan melakukan bimbingan teknis secara berkesinambungan dalam rangka penggunaan Portal Satu Data DPR RI sebagai instrumen penerapan tata kelola data yang baik oleh para produsen data;
- d. Melakukan sosialisasi terkait keamanan informasi secara berkala dan berkesinambungan tidak hanya untuk ASN dan TA/SAA pendukung Anggota Dewan, melainkan juga sosialisasi kepada Tenaga Sistem Pendukung (TSP) di lingkungan DPR RI;
- e. Pusat Teknologi Informasi yang memegang peranan penting dalam penyediaan akses internet di seluruh gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka perlu memprioritaskan peningkatan kecepatan akses internet dalam menunjang produktivitas kerja pada area-area publik tertentu;
- f. Pusat Teknologi Informasi untuk dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perencanaan dan penganggaran dalam mengantisipasi permasalahan terkait blokir atau bintang pada anggaran kegiatan teknologi informasi terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan layanan yang bersifat strategis yang mana harus tetap berjalan pada masa pergantian tahun anggaran untuk memitigasi risiko terhentinya layanan.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 5 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
NIP. 19650705 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,5)
2.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi	1. Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%
		2. Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	95%
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi	3,31
		4. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi	95%

Satker/Program/Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp57.672.789.000,00

Sekretaris Jenderal,


Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
 NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 5 Oktober 2023
 Kepala Pusat Teknologi Informasi,


Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
 NIP. 19650705 199103 1 003



LAMPIRAN 2
SURAT TUGAS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B/003 /PR.05.04/1/2024

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pegawai di lingkungan Pusat Teknologi Informasi.
- b. bahwa untuk penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.
- Menimbang : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023;

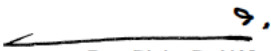
Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	JABATAN
1.	Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.	198506102009122003	Pranata Komputer Ahli Muda
2.	Awang Eko Feryanto, S.Kom.	198211052003121004	Pranata Komputer Ahli Muda
3.	Astari Khaniasty, S.Kom	199010152022032001	Pranata Komputer Ahli Pertama
4.	Bagus Tri Astadi, S.T.	199505312022021001	Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	Ahmad Riyadi, S.T.	199602212022021001	Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk : melakukan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023.

Jakarta, 2 Januari 2024
Kepala Pusat Teknologi Informasi,


Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
NIP. 196507051991031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
 3. Kepala Bidang Sistem Informasi & Infrastruktur TI
 4. Kepala Bidang Tata Kelola TI
 5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN 3

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT UTAMA



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Tingkat Eselon II di Pusat Teknologi Informasi untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pusat Teknologi Informasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

LAMPIRAN 4

SERTIFIKAT YANG DIPEROLEH PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI



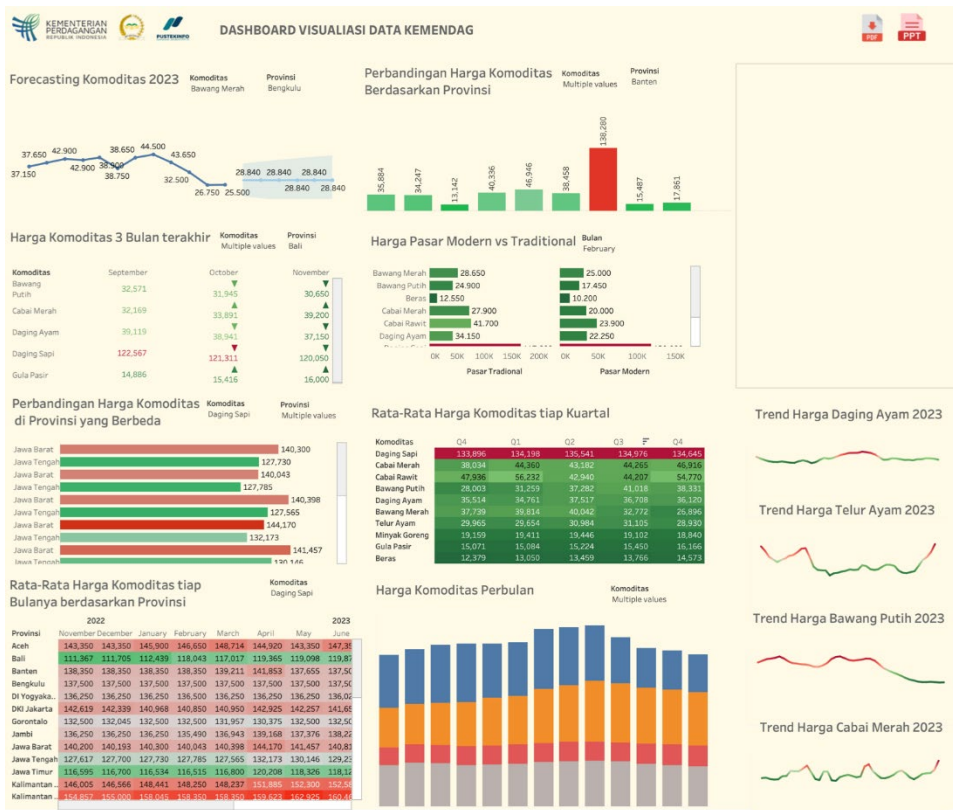
Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022



Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Keamanan Siber (Cyber Security Maturity) DPR RI Tahun 2023

LAMPIRAN 5

EXECUTIVE DASHBOARD DATA ANALITIK



Dashboard Data Analitik Harga Bahan Pokok



Dashboard Data Analitik Pusbangkom

LAMPIRAN 7

DOKUMENTASI NGOBROL SEPUTAR IT (NGOPI) SETJEN DPR RI



Foto Kegiatan Ngopi "Meningkatkan Keamanan Siber" dengan Para Pakar dan Dihadiri Deputi Administrasi



Foto Kegiatan Ngopi Edisi "Aman, Nyaman ber-Media Sosial" dengan Pihak Lembaga Sertifikasi Audit dan Praktisi

LAMPIRAN 8
DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASIONAL TIK



Penggunaan Ruang Penyimpanan Data Parlemen Pusat Data TelkomSigma



Pemeliharaan Rutin Jaringan



Foto Kegiatan Audit TIK Internal Bersama Inspektorat

LAMPIRAN 9

DAFTAR KEBIJAKAN TIK DAN DAFTAR APLIKASI

Tabel Daftar SOP yang Telah Disusun Tahun 2023

No	SOP	No. SOP AP	Tanggal Penetapan
1	Permohonan Masuk Area Data Center	OT.03.03 - 0190	30/04/2023
2	Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi	OT.03.03 - 0191	30/04/2023
3	Pengelolaan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi	OT.03.03 - 0192	30/04/2023
4	Penyusunan Business Continuity Plan (BCP)	OT.03.03 - 0193	30/04/2023
5	Penyusunan Business Impact Analysis (BIA)	OT.03.03 - 0194	30/04/2023
6	Penanganan Instalasi Software	OT.03.03 - 0195	30/04/2023
7	Pengelolaan Perubahan	OT.03.03 - 0196	30/04/2023
8	Penggunaan Removable Media	OT.03.03 - 0197	30/04/2023
9	Penjadwalan Backup	OT.03.03 - 0198	30/04/2023
10	Permintaan Pembukaan dan Penutupan Akses User bagi Pegawai dan Penyedia Barang/ Jasa	OT.03.03 - 0199	30/04/2023
11	Restore Data	OT.03.03 - 0200	30/04/2023
12	Reviu Hak Akses	OT.03.03 - 0201	30/04/2023
13	Reviu Log Administrator	OT.03.03 - 0202	30/04/2023

Tabel Daftar Persekjen dan SK yang Telah Disusun Tahun 2023

Jenis Produk Hukum	Nomor	Tentang	Tanggal Penetapan/ Tahun
Persekjen	4	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	31 Maret 2023
Persekjen	8	Pencabutan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024	7 Agustus 2023
Persekjen	11	Manajemen Layanan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	13 September 2023

Jenis Produk Hukum	Nomor	Tentang	Tanggal Penetapan/ Tahun
SK	44	<i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	2 Januari 2023
SK	220	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 73/SEKJEN/2023 tentang Tim Pengelola Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	18 Januari 2023
SK	790	Pembentukan Tim Pengelola <i>Command Center</i> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	1 Maret 2023
SK	808	Pembentukan Tim Pengelola Website Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	2 Maret 2023
SK	1044	Penyelenggara Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1045	Ruang Lingkup dan Pernyataan Kesesuaian Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sesuai dengan Standar ISO 27001:2022 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1046	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1047	Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1048	Petunjuk Teknis <i>Business Continuity Plan</i> pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1051	Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023	10 April 2023
SK	1552	Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	5 Juli 2023
SK	1787	Penetapan Perubahan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024	8 Agustus 2023
SK	2079	Penetapan Arsitektur Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023

Jenis Produk Hukum	Nomor	Tentang	Tanggal Penetapan/ Tahun
SK	2080	Penetapan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2081	Penetapan Pedoman Pengelolaan Aplikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2082	Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2083	Penetapan Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra Dan Sistem Penghubung Layanan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2084	Penetapan Pedoman Pengelolaan Pusat Data Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023

Tabel Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Selama Tahun 2023

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
1	BAMUS (Uji Pejabat Publik, Surat Masuk, Surat Keluar, Flow), Integrasi dengan SIRIH)	BAMUS merupakan Website Badan Musyawarah DPR RI yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait BAMUS seperti profil, kalender, jadwal rapat, SK keanggotaan fraksi pada AKD, SK pimpinan AKD, SK pemberian persetujuan/pertimbangan/konsultasi, galeri, daftar anggota dan sekretariat.	Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	V	
2	AIPA 44	AIPA 44 adalah website conference yang menjadi bagian sub website dari BKSAP. AIPA44 dibuat dalam rangka media informasi kegiatan AIPA 44 yang dimana indonesia dalam hal ini DPR RI menjadi tuan rumah.	Badan Kerjasama Antar Perlemen		V
3	Pamdal (Penambahan fitur SIPAPER)	SIPAPER adalah modul tambahan pada aplikasi pamdal.dpr.go.id. SIPAPER merupakan aplikasi yang dirancang sebagai sistem pengamanan perumahan	Biro Umum	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
4	TSP (Admin, front end)	Aplikasi Manajemen Tenaga Sistem Pendukung dibuat untuk mengelola	Biro SDMA		V
5	Uji Pejabat Publik (Admin)	Uji Pejabat Publik admin Tedapat pada sub menu aplikasi akd.dpr.go.id	BAMUS		V
6	Learning Management System	Website Learning Management System (LMS) adalah platform daring yang dirancang untuk mengelola dan menyampaikan berbagai kegiatan pembelajaran secara digital. LMS menyediakan ruang virtual di mana pengajar dapat membuat, menyusun, dan menyampaikan konten pendidikan, serta memonitor dan mengevaluasi kemajuan peserta didik.	PUSBANGKOM		V
7	Cuti Online	Aplikasi Cuti online adalah modul yang dibuat untuk memfasilitasi pegawai dalam hal mengajukan cuti.	BIRO SDMA	V	
8	Langit	Langit adalah platform yang menyediakan Layanan Data Digital Persidangan Terintegrasi. Langit dirancang untuk memfasilitasi proses persidangan dengan mengintegrasikan berbagai data dan informasi yang terkait ke dalam satu sistem yang terpusat.	BIRO Persidangan 1	V	
9	Website Perpustakaan	Website perpustakaan adalah suatu platform daring yang menyediakan akses elektronik ke berbagai layanan perpustakaan, termasuk katalog online, peminjaman buku secara digital, informasi tentang koleksi, jadwal acara, dan sumber daya elektronik lainnya.	Biro Humas dan Protokol		V
10	Website Setjen DPR RI	Website Setjen DPR RI adalah website yang berisi tentang informasi-informasi terkait kesetjenan. Berisi berita, agenda, kegiatan, dan layanan lainnya.	Pustekinfo		V
11	Website DPR RI	Website DPR RI adalah platform daring resmi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Situs ini menyediakan informasi terkini tentang aktivitas, kebijakan, legislasi, anggota parlemen, dan berbagai hal terkait tugas dan fungsi DPR RI.	Pustekinfo	V	
12	STELA	Aplikasi STELA adalah Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan yang digunakan untuk mengelola permintaan	Pustekinfo	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
		layanan teknologi informasi yang ditujukan ke Pusat Teknologi Informasi, dengan tiga fungsi utama yaitu sistem tiket digital, eskalasi layanan, dan sistem <i>rating</i> .			
13	SIAP KP4	SIAP KP4 adalah sub website yang merupakan bagian dari website SIAP. KP4 berisi data diri dan keluarga pegawai.	Biro SDMA	V	
14	SIMATA	Aplikasi SIMATA adalah Sistem Informasi Manajemen Talenta yang digunakan untuk mengetahui pegawai yang sudah divisualisasi dengan dipetakan sesuai dengan potensi dan kinerja agar menjadi acuan keputusan untuk pengaturan dalam kepegawaian.	Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN		V
15	SIRIH	SIRIH (sirih.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi risalah DPR RI. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi risalah yang dimuat dan dikelola pada laman website DPR.	Bagian Risalah	V	
16	Ortala (Evaluasi Kelembagaan)	Website ortala adalah Bagian dari unit Organisasi dan Tata Laksana yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal.	Bagian Ortala	V	
17	Perjadin (Modul Merpati =>Kunker Perorangan Anggota, Update modul SIPAMAN, SILOPER, ABIDIN)	Perjadin adalah sistem informasi perjalanan dinas yang berisi data dokumentasi perjalanan dinas pegawai dan anggota. SILOPER (perjadin.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi loket perjalanan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan sistem informasi loket perjalanan yang dimuat dan dikelola.	Bagian Perjalanan	V	
18	SAKIP	Website SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Setjen DPR adalah platform daring yang dikelola oleh Setjen DPR untuk menyajikan informasi terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Setjen DPR RI	Bagian PKORB	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
19	SIMONIZ (Sistem Informasi Permohonan Izin dan Dukungan Anggaran)	Aplikasi Simoniz DPR adalah singkatan dari Sistem Informasi Permohonan Izin dan Dukungan Anggaran yang digunakan untuk mengelola permohonan izin dan dukungan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat	Deputi Administrasi		V
20	SINONA	Adalah aplikasi yang berisi Proses lamaran dan update data secara online bagi para Pegawai Kontrak di lingkungan Setjen DPR RI. Pegawai Kontrak akan melengkapi administrasi menggunakan aplikasi SINONA	Bagian MSDM	V	
21	PPNPN (Status Pajak)	Website PPNPN adalah platform yang disediakan sebagai sistem informasi manajemen TSP	Bagian MSDM	V	
22	SIRIH (Integrasi Siperdana)	Website Sistem Informasi Risalah DPR adalah platform daring yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyajikan risalah atau catatan resmi hasil rapat dan sidang DPR.	Bagian Risalah	V	
23	JDIH (update dan perbaikan integrasi API dengan BPHN)	Website JDIH DPR merupakan platform daring yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyediakan akses elektronik kepada publik terkait dengan dokumen hukum dan informasi terkait legislasi.	Bagian Humas	V	
24	DUMAS (Penambahan fitur analisa surat tembusan)	Website Pengaduan Masyarakat DPR adalah platform daring yang disediakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai saluran resmi bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan atau aspirasi.	Bagian Pengaduan Masyarakat	V	
25	PERISAI	Adalah aplikasi yang menjadi wadah sebagai instansi pembina bagi jabatan fungsional (lupa gw apa aja) bagi pns di instansi daerah	Bagian Bina Jabfung		V
26	SIREVI (Perencanaan untuk Pengajuan Revisi Anggaran)	Sirevi adalah adalah website yang berisi seputar perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan.	Bagian Perencanaan	V	

LAMPIRAN 10

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Tabel 35 Realisasi Penggunaan Anggaran Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023

Kegiatan	Pengenal	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu	%
ANGGARAN PUSAT						
Belanja Bahan (Jamuan, Seminar Kit)	WA.5795.EBA.962.051.A.521211	308.295.000	307.412.750	99,71%	882.250	0,29%
Belanja Honor Output Kegiatan	WA.5795.EBA.962.051.A.521213	77.550.000	67.650.000	87,23%	9.900.000	12,77%
Biaya Peserta Seminar	WA.5795.EBA.962.051.A.521219	962.000.000	954.308.000	99,20%	7.692.000	0,80%
Honorarium Narasumber	WA.5795.EBA.962.051.A.522151	200.200.000	190.800.000	95,30%	9.400.000	4,70%
Biaya Perjalanan Dinas Biasa	WA.5795.EBA.962.051.A.524111	485.072.000	476.011.006	98,13%	9.060.994	1,87%
Transport dalam kota	WA.5795.EBA.962.051.A.524113	37.560.000	37.490.000	99,81%	70.000	0,19%
Paket Meeting Dalam Kota	WA.5795.EBA.962.051.A.524114	424.592.000	418.530.000	98,57%	6.062.000	1,43%
Paket Meeting Luar Kota	WA.5795.EBA.962.051.A.524119	418.560.000	402.250.000	96,10%	16.310.000	3,90%
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri	WA.5795.EBA.962.051.A.524219	526.445.000	526.444.800	100,00%	200	0,00%
Belanja Bahan (Jamuan, Pencetakan Buku LK)	WA.5795.EBA.962.051.B.521211	20.652.000	20.652.000	100,00%	-	0,00%
Honorarium PPNASN	WA.5795.EBA.994.002.A.522191	1.290.446.000	1.254.570.175	97,22%	35.875.825	2,78%
	JUMLAH REALISASI PUSAT	4.751.372.000	4.656.118.731	98,00%	95.253.269	2,00%

SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR TI						
Belanja Barang Operasional Lainnya	WA.5795.EBA.963.051.A.521119	594.000.000	594.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan License dan Support IP Locater	594.000.000	594.000.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Jasa Konsultan	WA.5795.EBA.963.051.A.522131	998.001.000	988.011.000	99,00%	9.990.000	1,00%
	Konsultan Perencanaan Pengembangan Ruang Server	998.001.000	988.011.000	99,00%	9.990.000	1,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	WA.5795.EBA.963.051.A.532111	10.814.296.000	10.801.998.460	99,89%	12.297.540	0,11%
	1. Pengadaan Switch Access	2.536.314.000	2.536.314.000	100,00%	-	0,00%
	2. Pengadaan Wireless Access Point	2.414.900.000	2.414.896.000	100,00%	4.000	0,00%
	3. Pengadaan Core Switch	860.500.000	860.500.000	100,00%	-	0,00%
	4. Pengadaan Wirewall VPN Concentrator	196.500.000	196.470.000	99,98%	30.000	0,02%
	5. Pengadaan Samsung Flitz (Mondopad)	340.000.000	340.000.000	100,00%	-	0,00%
	6. Pengadaan Access Point Wisma Griya Sabha Kopo	1.397.250.000	1.397.250.000	100,00%	-	0,00%

	7. Pengadaan Distributions Switch	2.321.772.000	2.321.771.460	100,00%	540	0,00%
	8. Pengadaan Perangkat Pengolah Data anggaran dan keuangan	48.510.000	48.507.000	99,99%	3.000	0,01%
	9. Pengadaan Alat Penyimpanan Data TVR	183.150.000	183.150.000	100,00%	-	0,00%
	10. Pengadaan Laptop untuk Perisalah	140.000.000	138.306.000	98,79%	1.694.000	1,21%
	11. Pengadaan Wireless Access Point Kompleks Parlemen	340.000.000	332.200.000	97,71%	7.800.000	2,29%
	11. Pengadaan SFP Connector Fiber Optic	35.400.000	32.634.000	92,19%	2.766.000	7,81%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	WA.5795.EBA.963.051.A.532121	2.142.000.000	2.142.000.000	100,00%	-	0,00%
	1. Pengadaan Upgrade Computing Big Data	1.072.000.000	1.072.000.000	100,00%	-	0,00%
	2. Pengadaan Peralatan Pendukung Simfoni	1.070.000.000	1.070.000.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Jasa Lainnya	WA.5795.EBA.963.052.A.522191	2.481.350.000	2.476.729.432	99,81%	4.620.568	0,19%
	1. Pengadaan Pusat Operasi Keamanan	1.981.350.000	1.981.350.000	100,00%	-	0,00%
	2. Jasa Perancangan Jaringan FO, UTP dan Kelistrikan Perangkat Jaringan di Komplek MPR/DPR/DPD RI	200.000.000	196.000.000	98,00%	4.000.000	2,00%
	3. Jasa Integrator System Portal Satu Data DPR RI	200.000.000	199.501.632	99,75%	498.368	0,25%
	4. Jasa Migrasi Hybrid Collaboration Single Sign On System	100.000.000	99.877.800	99,88%	122.200	0,12%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	WA.5795.EBA.963.052.A.523121	165.000.000	149.295.000	90,48%	15.705.000	9,52%
	1. Perbaikan Instalasi Alat Pemadam Kebakaran	165.000.000	149.295.000	90,48%	15.705.000	9,52%
Belanja Pemeliharaan Jaringan	WA.5795.EBA.963.052.A.523133	1.667.890.000	1.667.698.410	99,99%	191.590	0,01%
	1. Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan	194.500.000	194.345.460	99,92%	154.540	0,08%
	2. Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen	127.700.000	127.672.200	99,98%	27.800	0,02%
	3. Pemeliharaan Wireless Access Point	197.580.000	197.580.000	100,00%	-	0,00%
	4. Pemeliharaan AC Ruang Server	157.850.000	157.842.000	99,99%	8.000	0,01%
	5. Pemeliharaan UPS Ruang Server	120.813.000	120.812.400	100,00%	600	0,00%
	6. Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran Ruang Server	130.536.000	130.536.000	100,00%	-	0,00%

	7.	Pemeliharaan Server Telkom sigma DPR RI	147.103.000	147.102.750	100,00%	250	0,00%
	8.	Pemeliharaan Server Gedung DPR RI	196.470.000	196.470.000	100,00%	-	0,00%
	9.	Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno	197.136.000	197.136.000	100,00%	-	0,00%
	10.	Pemeliharaan Peralatan Command Center	198.202.000	198.201.600	100,00%	400	0,00%
		WA.5795.EBA.963.052.A.524111	153.300.000	153.020.000	99,82%	280.000	0,18%
		Belanja Perjalanan Biasa					
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	873.100.000	871.790.115	99,85%	1.309.885	0,15%
	1.	Pengadaan Peralatan AC	196.970.000	196.969.500	100,00%	500	0,00%
	2.	Pengadaan Baterai UPS Ruang Server	156.180.000	156.177.000	100,00%	3.000	0,00%
	3.	Pengadaan dan Pengujian FM200	196.950.000	196.941.750	100,00%	8.250	0,00%
	5.	Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer	163.000.000	162.393.000	99,63%	607.000	0,37%
	6.	Pengadaan Peralatan Pranata Komputer dan Peralatan Monitoring	160.000.000	159.308.865	99,57%	691.135	0,43%
		WA.5795.EBA.963.053.A.524111	175.452.000	174.900.641	99,69%	551.359	0,31%
		Belanja Perjalanan Biasa					
		Belanja Penambahan Nilai dan Jaringan	1.038.155.000	1.023.507.024	98,59%	14.647.976	1,41%
	1.	Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Nusantara I	164.900.000	164.861.640	99,98%	38.360	0,02%
	2.	Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Wisma Kopo	196.020.000	196.018.674	100,00%	1.326	0,00%
	3.	Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Setjen DPR RI	181.445.000	181.443.930	100,00%	1.070	0,00%
	4.	Penarikan dan Perapihan Jaringan Internet Komplek Parlemen	200.000.000	198.482.430	99,24%	1.517.570	0,76%
	5.	Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel UTP Gedung Nusantara	195.790.000	195.787.350	100,00%	2.650	0,00%
	6.	Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Ruang Kerja	100.000.000	86.913.000	86,91%	13.087.000	13,09%
		WA.5795.EBA.963.054.A.521119	11.100.009.000	11.091.254.447	99,92%	8.754.553	0,08%
		Belanja Barang Operasional Lainnya					
	1.	Pengadaan Lisensi Zoom Webinar dan Paripurna	382.505.000	382.505.000	100,00%	-	0,00%
	2.	Pengadaan License Analisis Kebijakan Parlemen	197.747.000	197.746.500	100,00%	500	0,00%
	3.	Pengadaan License Pengolahan Media Sosial	197.297.000	197.296.950	100,00%	50	0,00%
	4.	Pengadaan License Pengolahan Data Legislasi	200.000.000	197.335.800	98,67%	2.664.200	1,33%
	5.	Pengadaan License Kearsipan	195.400.000	195.360.000	99,98%	40.000	0,02%
	6.	Pengadaan License Pengolahan Data TV Parlemen	198.002.000	198.001.800	100,00%	200	0,00%
	7.	Pengadaan Renewal Support Link Controller	196.500.000	196.470.000	99,98%	30.000	0,02%
	8.	Pengadaan Renewal Support Core Switch dan Smartzone	64.824.000	64.824.000	100,00%	-	0,00%
	9.	Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall di Gedung DPR RI	2.990.000.000	2.990.000.000	100,00%	-	0,00%
	10.	Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall	1.904.800.000	1.904.760.000	100,00%	40.000	0,00%
	11.	Pengadaan Renewal Support and Subscription Security Colocation di Telkomsigma	890.000.000	890.000.000	100,00%	-	0,00%
	12.	Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall Colocation Taman Tekno	1.320.000.000	1.320.000.000	100,00%	-	0,00%
	13.	Pengadaan Renewal Support Wireless Access Point	197.035.000	197.033.880	100,00%	1.120	0,00%
	14.	Pengadaan License dan Support Ruckus Smartcell Insight	200.000.000	198.886.470	99,44%	1.113.530	0,56%
	15.	Pengadaan License Antivirus	749.440.000	749.440.000	100,00%	-	0,00%
	16.	Pengadaan License Software Office	200.000.000	199.284.017	99,64%	715.983	0,36%
	17.	Pengadaan License Software Sistem Operasi	197.109.000	197.108.250	100,00%	750	0,00%
	18.	Pengadaan License Software Perkantoran	200.000.000	198.079.500	99,04%	1.920.500	0,96%
	19.	Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall Januari 2023	121.850.000	121.848.030	100,00%	1.970	0,00%
	20.	Renewal Software Backup	297.500.000	297.500.000	100,00%	-	0,00%
	21.	Pengadaan Lisensi Tableau Server dan Tenable Nessus	200.000.000	197.774.250	98,89%	2.225.750	1,11%
		WA.5795.EBA.963.054.A.521213	16.940.000	16.870.000	99,59%	70.000	0,41%
		Belanja Jasa Lainnya	200.000.000	199.018.560	99,51%	981.440	0,49%
	1.	Pengadaan Pengukuran Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Setjen DPR RI	200.000.000	199.018.560	99,51%	981.440	0,49%
		Belanja Modal Lainnya	592.000.000	592.000.000	100,00%	-	0,00%
	1.	Pengadaan Aplikasi "Notulite Pro" Bagian Risalah	592.000.000	592.000.000	100,00%	-	0,00%

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	WA.5795.EBA.963.054.A.536121	200.000.000	198.912.000	99,46%	1.088.000	0,54%
1.	Pengembangan Website SDMA	200.000.000	198.912.000	99,46%	1.088.000	0,54%
Belanja Jasa Lainnya	WA.5795.EBA.963.056.A.522191	200.000.000	197.857.500	98,93%	2.142.500	1,07%
	Pengelola Proses Bisnis Data Analitik	200.000.000	197.857.500			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	WA.5795.EBA.963.056.A.532111	497.160.000	493.306.200	99,22%	3.853.800	0,78%
1.	Pengembangan Peralatan Command Center	197.160.000	197.158.200	100,00%	1.800	0,00%
2.	Pengadaan Peralatan Virtual Meeting Command Center	200.000.000	199.023.000	99,51%	977.000	0,49%
3.	Pengadaan Media Collaborator Command Center	100.000.000	97.125.000	97,13%	2.875.000	2,88%
Jamuan rapat-rapat Honor Output Kegiatan	WA.5795.EBA.963.057.A.521211	94.326.000	94.282.000	99,95%	44.000	0,05%
	WA.5795.EBA.963.057.A.521213	71.800.000	66.750.000	92,97%	5.050.000	7,03%
1.	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa	-	-	0,00%	-	0,00%
2.	Tim Pengelola Website Setjen	71.800.000	66.750.000	92,97%	5.050.000	7,03%
Belanja Sewa	WA.5795.EBA.963.057.A.522141	2.695.970.000	2.695.968.000	100,00%	2.000	0,00%
1.	Sewa Ruang Penyimpanan Data Parlemen	757.910.000	757.908.000	100,00%	2.000	0,00%
2.	Sewa Ruang Penyimpanan Dokumen Terpadu	1.938.060.000	1.938.060.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Perjalanan Biasa	WA.5795.EBA.963.057.A.524111	353.472.000	353.122.000	99,90%	350.000	0,10%
Langganan Jasa	WA.5795.EBA.994.002.B.521111	9.576.897.000	9.573.627.700	99,97%	3.269.300	0,03%
1.	Langganan Jasa Internet Dewan	4.100.000.000	4.099.200.000	99,98%	800.000	0,02%
2.	Langganan Jasa Internet Setjen	2.800.000.000	2.799.600.000	99,99%	400.000	0,01%
3.	Langganan Jasa Internet Colocation Telkomsigma	660.000.000	660.000.000	100,00%	-	0,00%
4.	Langganan VPN IP Pusat Data Nasional	162.638.000	162.637.200	100,00%	800	0,00%
5.	Langganan Jasa Internet Colocation Taman Tekno	920.000.000	919.746.000	99,97%	254.000	0,03%
6.	Langganan WA Gateway Dewan	198.140.000	198.135.000	100,00%	5.000	0,00%
7.	Langganan WA Gateway Setjen	198.024.000	198.024.000	100,00%	-	0,00%
8.	Langganan SMS Gateway Dewan	196.470.000	196.470.000	100,00%	-	0,00%
9.	Langganan WA Gateway	200.000.000	198.190.500	99,10%	1.809.500	0,90%
10.	Langganan License VPN dan SSL	41.625.000	41.625.000	100,00%	-	0,00%
11.	Langganan Jasa Internet Link Dukcapil	100.000.000	100.000.000	100,00%	-	0,00%
Honor Output Kegiatan	WA.5795.EBA.994.002.B.521213	-	-	0,00%	-	0,00%
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	WA.5795.EBA.994.002.B.521252	35.000.000	34.186.890	97,68%	813.110	2,32%
1.	Pengadaan Perlengkapan Komputer Jaringan	35.000.000	34.186.890	97,68%	813.110	2,32%
Belanja Jasa Konsultan	WA.5795.EBA.994.002.B.522131	903.000.000	891.195.500	98,69%	11.804.500	1,31%
1.	Jasa Konsultan Perorangan <i>Business Analyst</i>	100.000.000	99.800.000	99,80%	200.000	0,20%
2.	Jasa Konsultan Perorangan <i>Data Scientist</i>	100.000.000	99.000.000	99,00%	1.000.000	1,00%
3.	Jasa Konsultan Perorangan <i>Data Engineer</i>	100.000.000	99.000.000	99,00%	1.000.000	1,00%
4.	Jasa Konsultan Perorangan <i>Data Analyst</i>	100.000.000	99.000.000	99,00%	1.000.000	1,00%
5.	Jasa Konsultan Perorangan <i>IT Administrator</i>	72.000.000	69.000.000	95,83%	3.000.000	4,17%
6.	Jasa Konsultan Perorangan <i>IT Technical Writer</i>	66.000.000	62.975.000	95,42%	3.025.000	4,58%
7.	Jasa Konsultan Perorangan <i>Analytic Business Analyst</i>	50.000.000	49.900.000	99,80%	100.000	0,20%
8.	Jasa Konsultan Pengelola Model Data Analitik	85.000.000	84.360.000	99,25%	640.000	0,75%
9.	Jasa Konsultan Pengelola Teknologi Data Analitik	85.000.000	84.360.000	99,25%	640.000	0,75%
10.	Jasa Konsultan Pengelola Arsitektur Data Analitik	85.000.000	84.360.000	99,25%	640.000	0,75%
11.	Jasa Konsultan Administrator Infrastruktur Data Analitik	60.000.000	59.440.500	99,07%	559.500	0,93%
Belanja Jasa Lainnya	WA.5795.EBA.994.002.B.522191	86.580.000	86.580.000	100,00%	-	0,00%
1.	Jasa Redesign Jaringan Access Point Wisma	86.580.000	86.580.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	WA.5795.EBA.994.002.B.523121	150.000.000	148.740.000	99,16%	1.260.000	0,84%
1.	Pengisian Fire Suppression System	150.000.000	148.740.000	99,16%	1.260.000	0,84%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	WA.5795.EBA.994.002.B.523136	556.987.000	551.469.090	99,01%	5.517.910	0,99%

	1.	Pengadaan peralatan kabel jaringan	168.610.000	168.609.000	100,00%	1.000	0,00%
	3.	Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan	197.660.000	197.652.150	100,00%	7.850	0,00%
	4.	Pengadaan Kabel UTP	99.980.000	96.348.000	96,37%	3.632.000	3,63%
	5.	Pengadaan Perlengkapan Patch Cord, Modular, dll	90.737.000	88.859.940	97,93%	1.877.060	2,07%
FAB		Sistem Informasi Pemerintahan					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		WA.5795.FAB.963.051.A.532111	150.000.000	149.511.450	99,67%	488.550	0,33%
	1.	Pengadaan Perangkat Online Streaming	150.000.000	149.511.450	99,67%	488.550	0,33%
Belanja Modal Lainnya		WA.5795.FAB.963.051.A.536111	600.000.000	589.294.560	98,22%	10.705.440	1,78%
	1.	Pembangunan Aplikasi Satu Data DPR RI	200.000.000	198.241.560	99,12%	1.758.440	0,88%
	2.	Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Pendukung	200.000.000	193.140.000	96,57%	6.860.000	3,43%
	3.	Pembangunan Sistem Repositori Aset Aplikasi Terintegrasi	200.000.000	197.913.000	98,96%	2.087.000	1,04%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya		WA.5795.FAB.963.051.A.536121	700.000.000	688.883.760	0,98	11.116.240	1,59%
	1.	Pengembangan Aplikasi Notula	100.000.000	99.500.400	99,50%	499.600	0,50%
	2.	Pengembangan Backend Website Setjen DPR RI	200.000.000	198.441.360	99,22%	1.558.640	0,78%
	3.	Pengembangan Aplikasi LMS Setjen DPR RI	200.000.000	198.912.000	99,46%	1.088.000	0,54%
	4.	Pengembangan Website AIPA	200.000.000	192.030.000	96,02%	7.970.000	3,99%
		Sistem Informasi Pemerintahan	1.450.000.000	1.427.689.770	2,96	22.310.230	1,54%
		JUMLAH REALISASI SITI	49.882.685.000	49.755.779.739	99,75	126.905.261	0,25%
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI							
Honor Output Kegiatan		WA.5795.EBA.963.052.B.521213	86.100.000	86.100.000	100,00%	-	0,00%
	1.	Honor Tim Pengelola Satu Data DPR RI	86.100.000	86.100.000	100,00%	-	-
Belanja Jasa Konsultan		WA.5795.EBA.963.053.B.522131	744.111.000	744.109.750	100,00%	1.250	0,00%
	1.	Konsultan Grand Design Keamanan Teknologi Informasi DPR RI	548.500.000	548.500.000	100,00%	-	-
	2.	Konsultan Sertifikasi ISO 27001	97.514.000	97.513.500	100,00%	500	-
	4.	Konsultan Perencanaan Implementasi ISO 27001	98.097.000	98.096.250	100,00%	750	-
Belanja Perjalanan Biasa		WA.5795.EBA.963.053.B.524111	202.080.000	194.651.200	96,32%	7.428.800	78,87%
Belanja Modal Lainnya		WA.5795.EBA.963.053.B.536111	200.000.000	198.388.080	99,19%	1.611.920	0,81%
	1.	Pengembangan Portal Satu Data DPR	200.000.000	198.388.080	99,19%	1.611.920	-
Honor Output Kegiatan		WA.5795.EBA.963.055.A.521213	65.050.000	65.050.000	100,00%	-	0,00%
	1.	Honor Tim Pengelola DPR RI - CSIRT	65.050.000	65.050.000	100,00%	-	-
Belanja Jasa Konsultan		WA.5795.EBA.963.055.A.522131	100.000.000	99.234.000	99,23%	766.000	0,77%
		Jasa Konsultan Perencanaan Tata Kelola Layanan TI	100.000.000	99.234.000	99,23%	766.000	-
Belanja Jasa Lainnya		WA.5795.EBA.963.055.A.522191	350.000.000	344.789.000	98,51%	5.211.000	1,49%
	1.	Penyusunan Arsitektur SPBE	250.000.000	245.000.000	98,00%	5.000.000	-
	2.	Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan Informasi	100.000.000	99.789.000	99,79%	211.000	-
Jamuan dan pencetakan		WA.5795.EBA.963.057.B.521211	149.234.000	149.030.000	99,86%	204.000	0,14%
Belanja Jasa Lainnya		WA.5795.EBA.963.057.B.522191	200.000.000	199.837.740	99,92%	162.260	0,08%
	1.	Evaluasi Produk dan Layanan E-Parlemen	200.000.000	199.837.740	99,92%	162.260	-
Belanja Perjalanan Biasa		WA.5795.EBA.963.057.B.524111	745.212.000	744.429.780	99,90%	782.220	0,10%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		WA.5795.EBA.963.057.B.532111	196.945.000	196.908.450	99,98%	36.550	0,02%
	1.	Pengadaan Alat Promosi Produk dan Layanan	196.945.000	196.908.450	99,98%	36.550	-
		JUMLAH REALISASI TKTI	3.038.732.000	3.022.528.000	99,47	16.204.000	0,53%
TOTAL REALISASI PUSTEKINFO			57.672.789.000	57.434.426.470	99,59	238.362.530	0,41%



**Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

LAPORAN

KINERJA

